

## **BAB III**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sajian Data**

Keputusan dikeluarkannya hak angket oleh anggota DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok menjadi kontroversi di berbagai kalangan. Ada yang menilai keputusan tersebut merupakan dendam lama anggota DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok dimana sebelumnya tidak semua anggota DPRD menyetujui diangkatnya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ada juga yang menilai langkah tersebut merupakan cara yang digunakan untuk memaksulkan Ahok dari kursi nomor satu di DKI Jakarta. Namun di sisi lain ada juga yang mendukung langkah yang dilakukan DPRD tersebut. Lantas isu hak angket ini mendapat perhatian dari berbagai media seperti Detik.com dan Kompas.com yang merupakan dua media *online* terbesar di Indonesia.

Dalam peristiwa ini, Detik.com dan Kompas.com mengambil sudut pandang tersendiri dalam memberitakannya. Oleh karena itu kita akan melakukan analisis *framing* kepada kedua media tersebut untuk melihat bagaimana Detik.com dan Kompas.com memposisikan diri dalam isu tersebut dan bagaimana realitas di bentuk dan disajikan dalam bentuk berita kepada masyarakat.

Pada Bab ketiga ini akan disajikan tentang pemberitaan dikeluarkannya hak angket oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok di surat kabar online Detik.com dan Kompas.com dengan mengambil 6 berita dari Detik.com dan 6 berita dari Kompas.com selama bulan Maret 2015. Permasalahan yang diambil

adalah pada proses dari hak angket, bukan keputusan akhir dari proses hak angket, dan juga berita yang diambil adalah tanggapan dan pendapat dari para pakar atau pelaku politik terhadap dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok. Dengan begitu kita bisa melihat bagaimana Detik.com dan Kompas.com memberitakan proses berjalannya hak angket dan bagaimana pandangan kedua media tersebut terhadap keputusan dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok.

Berikut adalah objek penelitian pada bulan Maret 2015 yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1

Objek Penelitian Detik.com dan Kompas.com

No	Detik.com		Kompas.com	
	Tanggal berita	Judul berita	Tanggal berita	Judul berita
1	Selasa, 3 Maret 2015 (09:07 WIB)	Dan Parpol pun Mulai Ragu Lanjutkan Hak Angket untuk Ahok	Kamis, 5 Maret 2015 (08:18 WIB)	DPRD DKI Kurang Perhitungan Lakukan Hak Angket
2	Minggu, 8 Maret 2015 (18:15 WIB)	Ketua DPD: Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Gubernur	Rabu, 11 Maret 2015 (09:08 WIB)	Hak Angket, Ahok, dan Akrobat Politik DPRD DKI
3	Jumat, 13 Maret 2015 (07:56 WIB)	Hadiri Rapat Revitalisasi Kota Tua Jadi Alasan Tim Angket Panggil Istri Ahok	Jumat, 13 Maret 2015 (15:05 WIB)	Panggil Istri Ahok Panitia Angket DPRD DKI Dipertanyakan Logika Hukumnya
4	Kamis, 19 Maret 2015 (06:29 WIB)	DPRD Fokus Bahas Evaluasi APBD, Pemeriksaan Angket Ahok Tertunda	Selasa, 17 Maret 2015 (08:24 WIB)	DPRD DKI yang Kurang Koordinasi
5	Senin,	Tim Angket	Selasa,	Tak Panggil

	23 Maret 2015 (14:00 WIB)	DPRD: Bisa Jadi Tak Perlu Panggil Ahok	24 Maret 2015 (16:46 WIB)	Ahok dalam Rapat Angket, DPRD Dinilai Tidak Etis
6	Selasa, 24 Maret 2015 (17:51 WIB)	Tim Angket akan Permasalahkan Ucapan Ahok yang Dinilai Kasar	Selasa, 24 Maret 2015 (21:01)	Hak Angket soal Etika Justru Akan "Menampar" DPRD DKI Jakarta

Sumber: Detik.com dan Kompas.com

Berita yang disajikan diatas kemudian akan di analisis menggunakan model analisis *framing* Pan dan Kosicki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Eriyanto bahwa analisis *framing* adalah metode yang dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Berdasarkan model Pan dan Kosicki, terdapat empat struktur besar dalam menganalisis berita. Pertama, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa dalam bentuk susunan umum berita (*lead*, latar, *headline*, kutipan yang diambil, dan sebagainya). Kedua, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga, struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangan atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Keempat, struktur retorik. Retorik berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca.

## **B. Analisis Objek Penelitian Detik.com**

### **1. Analisis Berita “Dan Parpol pun Mulai Ragu Lanjutkan Hak Angket untuk Ahok”**

Sebelum melakukan analisis berita, maka perlu diketahui bahwa berita ini masuk dalam jenis berita *indepth news*. Berita ini berisi pendapat dari anggota DPRD DKI terkait kelanjutan peristiwa hak angket dimana adanya perintah dari DPP partai masing-masing yang menyuruh fraksi menarik dukungan terhadap hak angket. Berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan dengan sudut pandang dari Kompas.com. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Detik.com terhadap hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis pada struktur **sintaksis**, **headline** yang digunakan adalah “Dan Parpol pun Mulai Ragu Lanjutkan Hak Angket”. Dari judul tersebut Detik.com memperlihatkan apa yang ingin disampaikan dalam berita mereka, bahwa parpol mulai ragu untuk tetap melakukan penyelidikan terhadap Ahok. Hal ini bertolak belakang dengan awal keputusan di keluarkannya hak angket dimana sebelumnya dimana 106 anggota DPRD DKI Jakarta telah sepakat bersama untuk mengeluarkan hak angket terhadap Ahok karena bagaimanapun setiap anggota DPRD adalah kader dari parpol dan segala keputusan bukan hanya didasarkan

individu, namun juga berdasarkan keputusan dari parpol. Hal tersebut dapat dilihat pada *lead* yang dicantumkan dalam teks berita sebagai berikut:

Imbas dari ribut Gubernur DKI Basuki T Purnama dan DPRD soal dana siluman APBD 2015, anggota DPRD ramai-ramai mengajukan hak angket. 106 Anggota DPRD sepakat secara bulat mengusung hak angket.

**Latar informasi** yang digunakan sebagai latar belakang untuk memperkuat *framingnya* adalah yang pertama, memberikan informasi fraksi NasDem yang menarik diri terhadap hak angket beserta alasan mengapa mereka menarik diri, yang kedua memberikan informasi bahwa fraksi Hanura, PDIP, dan PKB pada tataran DPP sudah mulai mengagendakan pertemuan dengan anggota DPRD-nya untuk membahas soal hak angket terhadap Ahok, dan yang ketiga memberikan informasi fraksi PPP yang bersifat netral namun memerintahkan kadernya di DPRD untuk mendukung Ahok hingga masa jabatannya selesai. Dengan latar informasi yang digunakan seperti ini, Detik.com membawa pandangan kepada khalayak bahwa hak angket menjadi kontroversi di internal partai.

Dalam berita ini, **kutipan sumber** yang digunakan Detik.com dalam teks beritanya yaitu dari Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus, Wakil Sekjen PKB Daniel Johan, dan Abraham 'Lulung' Lunggana. Bestari Barus sebagai narasumber yang fraksinya sudah menarik diri dari hak angket. Daniel Johan sebagai narasumber yang masih belum pasti menetapkan apakah fraksi mereka akan menarik diri atau tidak, sedangkan Abraham Lulung Lunggana adalah narasumber yang menolak untuk menarik diri terkait hak angket. Dengan begitu Detik.com berusaha subjektif dengan menggunakan 3 narasumber yang berbeda

pandangan dan juga latar belakang partai. Namun, perbedaan pandangan inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk memperlihatkan bahwa hak angket menjadi pro dan kontra di internal partai.

Berikut **pernyataan** dari ketiga narasumber yang dicantumkan dalam teks berita. Bestari Barus dalam pernyataannya mengatakan “Kenapa harus repot-repot hak angket, padahal lembaga hukum lainnya seperti Kejaksaan dan KPK sudah berjalan?”. Pernyataan tersebut memberi pandangan bahwa hak angket bukanlah keputusan yang tepat dalam menyelidiki soal anggaran siluman APBD DKI Jakarta, namun lembaga hukum KPK lebih berwenang menangani kasus ini.

Pernyataan berikutnya dari Daniel Johan yaitu “Soal kemungkinan besar itu ditarik. Tapi, ini belum final”. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa fraksi PKB belum bisa memastikan penarikan diri dari hak angket. Dan pernyataan terakhir dari Abraham Lulung Lunggana seperti berikut: “Biarin aja, dia ketua umum saya. Saya tetap konsisten kepada saya sebagai anggota dewan, kan saya bisa tolak dengan penjelasan yang sangat objektif dan substansi,”. Dari pernyataannya terlihat bahwa Lulung tetap akan mendukung hak angket walaupun ada perintah penarikan dari fraksinya.

Dengan skema penyusunan pernyataan yang berbeda pandangan tersebut bisa dilihat Detik.com ingin memperlihatkan pro-kontra yang terjadi di internal partai maupun terhadap hak angket. **Penutup** berita yang digunakan Detik.com adalah mencantumkan pengertian hak angket dan hak masing-masing anggota DPRD terhadap hak angket. Berikut penutup yang dimuat dalam teks:

Soal hak angket ini memang menjadi hak masing-masing anggota dewan. Hak angket menjadi salah satu hak anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan DPRD untuk menyelidiki suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas tetapi diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Soal adanya campur tangan DPP dalam keputusan kadernya, itu sepenuhnya menjadi aturan internal masing-masing partai.

Penutup tersebut memberikan kesimpulan kepada pembaca bahwa hak angket adalah hak masing-masing anggota DPR namun keputusan DPP terkait hak angket menjadi aturan internal. Dengan begitu keputusan DPP yang memerintahkan anggotanya menarik diri adalah hak internal partai namun tidak bisa mempengaruhi hak individu dari anggotanya di DPRD apakah akan melanjutkan hak angket atau mengikuti keputusan partai sehingga pembaca akan mengerti kenapa hal ini menjadi pro kontra dilingkup parpol.

Frame Detik.com yang melihat hak angket menjadi pro-kontra di *internal* partai dapat dilihat pada bagaimana Detik.com mengisahkannya dalam model 5W+1H atau dalam model analisis *framing* Pan dan Kosicki disebut dengan **skrip**. Berdasarkan analisis struktur skrip, berita ini mengisahkan partai politik yang mulai ragu lanjutkan hak angket untuk Ahok (*what*). Parpol yang diberitakan adalah NasDem, PDIP, PKB, PPP, dan Hanura (*who*). Adanya perintah penarikan diri dari parpol fraksi NasDem terhadap hak angket dan adanya agenda pertemuan parpol dengan anggota DPRDnya untuk membahas soal hak angket adalah sebagai bentuk keraguan dari Parpol untuk melanjutkan hak angket (*why*). Unsur *when* dalam berita adalah Senin 2 Maret 2015 dan unsur *where* adalah Kantor DPP NasDem, Jl RP Soeroso, Gondangdia Jakarta Pusat. Unsur *how* dalam berita dapat ditemukan pada paragraf ke 7 yang menjelaskan bagaimana langkah parpol

lain dalam menyikapi keputusan hak angket dari para anggotanya di DPRD. Dengan begitu struktur skrip dalam berita sudah memenuhi unsur berita 5W+1H.

*Frame* Detik.com terlihat jelas pada struktur tematik berita. Berdasarkan analisis struktur **tematik**, berita ini membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Tema yang ditampilkan adalah hak angket menimbulkan pro-kontra di internal partai. Hal tersebut dapat dilihat pada penyusunan paragraf yang secara detail memberikan tiga pandangan berbeda dan juga penggunaan koherensi pada kalimatnya. Yang *pertama*, pandangan dari fraksi yang sudah pasti mencabut dukungan hak angket. Dalam teks berita dijelaskan fraksi NasDem yang pertama kali menarik pengajuan hak angket. Pandangan ini disusun dengan memberikan **detail** pada paragraf kedua tentang alasan NasDem menarik diri terhadap hak angket. Alasan tersebut dilengkapi oleh perangkat framing **koherensi penjelas** pada kalimat “tak perlu mengajukan hak angket **dan** lebih memilih menyerahkan masalah APBD DKI pada institusi hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian.

Pandangan yang kedua adalah fraksi yang belum pasti apakah menarik atau melanjutkan hak angket. Dalam teks berita dijelaskan fraksi yang belum pasti adalah Hanura, PDIP, dan PKB. Hal ini dapat dilihat dengan **detail** yang panjang pada paragraf keenam sampai paragraf kedelapan yang memberikan penjelasan masing-masing fraksi terkait putusannya. Terdapat **koherensi pembeda** pada paragraf ketujuh dimana secara langsung memperlihatkan pandangan yang kedua ini. Koherensi tersebut dapat dilihat pada kalimat “DPP PKB sendiri juga disebut sudah memutuskan untuk menarik hak angket **namun** belum diputuskan secara



resmi. Dengan begitu dapat dilihat bahwa belum ada kepastian dari PKB apakah akan tetap melanjutkan hak angket atau tidak.

Pandangan yang ketiga adalah pandangan pihak yang tetap akan melanjutkan hak angket walaupun ada perintah penarikan dari DPP Partai. Dalam teks berita pandangan ini dinyatakan oleh Abraham Lulung Lunggana dari fraksi PPP yang tetap akan melanjutkan hak angket. Lulung menilai langkahnya melanjutkan hak angket memiliki alasan yang kuat. Pandangan ini diperkuat dengan perangkat framing **koherensi sebab akibat** pada kalimat “Berbeda dengan PKB, Hanura dan PDIP yang akan mengadakan rapat internal partai dan mengambil sikap, PPP kubu Djan Faridz justru bersikap netral **karena** menilai hak angket adalah hak pribadi anggota dewan”. Hal ini diperkuat juga dengan perangkat framing **detail** pada paragraf terakhir teks berita yang menjelaskan tentang maksud dari hak angket. Dengan begitu terlihat bahwa pandangan ini tetap akan melanjutkan hak angket terhadap hak angket.

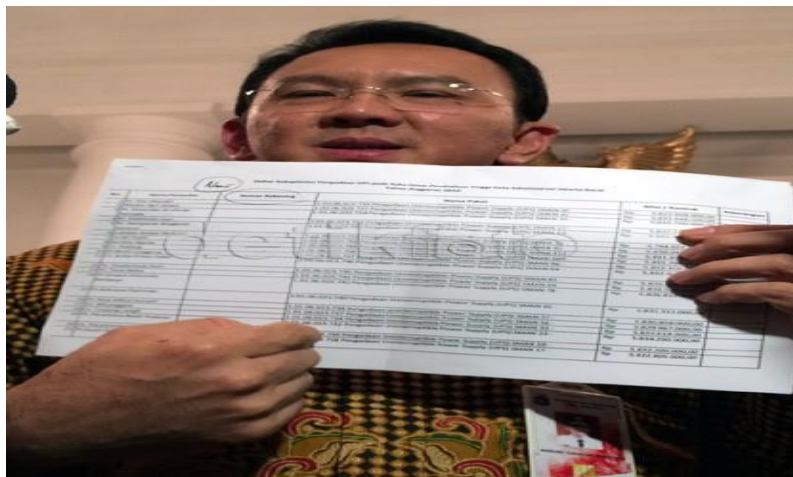
Selanjutnya bagaimana Detik.com menekankan fakta dapat dilihat pada struktur **retoris**. Berdasarkan analisis struktur retoris, penekanan-penekanan yang dipakai adalah berupa penggunaan label jabatan dalam partai. Bestari Barus dilekati dengan kata “Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI”, Daniel Johan dilekati dengan kata “Wakil Sekjen PKB”, yang secara langsung mengkomunikasikan bahwa apa yang disampaikan adalah benar menjadi pro-kontra di internal partai dan layak dalam menyampaikan fakta. Untuk menekankan bahwa ada keraguan di internal partai, digunakan kata “gamang”. Arti kata “gamang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **merasa takut**

**(ngeri serta khawatir)** (<http://kbbi.web.id/gamang>, diakses tanggal 1 November 2015, pukul 20.02 WIB). Penggunaan kata “gamang” disini menggambarkan adanya ketakutan parpol dalam keputusan kadernya untuk menggulirkan hak angket terhadap Ahok sehingga parpol ragu dalam melanjutkan hak angket.

Selain itu terdapat perangkat framing grafis dalam berita berupa foto dari Ahok. Berikut foto yang ditampilkan:

Gambar 3.1

Foto pada berita “Dan Parpol pun Mulai Ragu Lanjutkan Hak Angket untuk Ahok”



Pada grafis tidak terdapat keterangan mengenai foto tersebut. Namun, bisa dikatakan foto ini digunakan sebagai penekanan pada aspek topik pemberitaan yang membahas masalah hak angket yang melibatkan Ahok.

Setelah dianalisis, pada berita ini Detik.com mencoba memberikan pandangan mereka terhadap hak angket yang disusun pada teks berita untuk disajikan kepada pembaca. Berita ini di konstruksi oleh Detik.com dengan

menampilkan pada keraguan Parpol terhadap hak angket, bukan dari anggota DPRD DKI yang sebelumnya sudah sepakat mengeluarkan hak angket terhadap Ahok. Detik.com tidak menyerang DPRD DKI, namun lebih kepada Parpol. Detik.com memberitakan hak angket sebagai keputusan yang benar dari anggota DPRD DKI. Dengan begitu *frame* yang dibuat oleh Detik.com yaitu ingin memperlihatkan bahwa hak angket menjadi pro-kontra di internal partai.

**Frame : Hak Angket Menimbulkan Pro-Kontra di Internal Partai**

Tabel 3.2

Sajian Analisis Berita “Dan Parpol pun Mulai Ragu Lanjutkan Hak Angket untuk Ahok”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Headline</i>: Dan Parpol pun Mulai Ragu Lanjutkan Hak Angket untuk Ahok</li> <li>2) <i>Lead</i>: Imbas dari ribut Gubernur DKI Basuki T Purnama dan DPRD soal dana siluman APBD 2015, anggota DPRD ramai-ramai mengajukan hak angket. 106 Anggota DPRD sepakat secara bulat mengusung hak angket.</li> <li>3) Latar Informasi: Yang pertama, memberikan informasi fraksi NasDem yang menarik diri terhadap hak angket beserta alasan mengapa mereka menarik diri, yang kedua memberikan informasi bahwa fraksi Hanura, PDIP, dan PKB pada tataran DPP sudah mulai mengagendakan pertemuan dengan anggota DPRD-nya untuk membahas soal hak angket terhadap Ahok, dan yang ketiga memberikan informasi fraksi PPP yang bersifat netral namun memerintahkan kadernya di DPRD untuk mendukung Ahok hingga masa jabatannya selesai.</li> <li>4) Sumber: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus</li> <li>b) Wakil Sekjen PKB Daniel Johan</li> <li>c) Abraham Lulung Lunggana</li> </ol> </li> <li>5) Pernyataan:</li> </ol>

	<p>“Kenapa harus repot-repot hak angket, padahal lembaga hukum lainnya seperti Kejaksaan dan KPK sudah berjalan?”</p> <p>“Soal kemungkinan besar itu ditarik. Tapi, ini belum final”</p> <p>“Biarin aja, dia ketua umum saya. Saya tetap konsisten kepada saya sebagai anggota dewan, kan saya bisa tolak dengan penjelasan yang sangat objektif dan substansi,”</p> <p>6) Penutup: Soal hak angket ini memang menjadi hak masing-masing anggota dewan. Hak angket menjadi salah satu hak anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan DPRD untuk menyelidiki suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas tetapi diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Soal adanya campur tangan DPP dalam keputusan kadernya, itu sepenuhnya menjadi aturan internal masing-masing partai.</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : Partai politik yang mulai ragu lanjutkan hak angket untuk Ahok</p> <p>8) <i>Who</i> : Parpol NasDem, PDIP, PKB, PPP, dan Hanura</p> <p>9) <i>Why</i> : Adanya perintah penarikan diri dari parpol fraksi NasDem terhadap hak angket, adanya agenda pertemuan parpol dengan anggota DPRDnya untuk membahas soal hak angket adalah sebagai bentuk keraguan dari Parpol untuk melanjutkan hak angket</p> <p>10) <i>Where</i> : Kantor DPP NasDem, Jl. RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat</p> <p>11) <i>When</i> : Senin, 2 Maret 2015</p> <p>12) <i>How</i> : Sedangkan DPP PDIP akan memanggil DPD DKI dan fraksi PDIP DPRD untuk meminta laporan dan klarifikasi. Setelah itu barulah DPP akan menentukan sikap. DPP PKB sendiri juga disebut sudah memutuskan untuk menarik hak angket namun belum diputuskan secara resmi. Keputusan partai akan resmi dikeluarkan setelah rapat internal kader digelar. Namun, disebut Wakil Sekjen PKB Daniel Johan bahwa kemungkinan akan dicabut.</p>
Tematik	13) Hak angket menimbulkan pro-kontra di internal partai.
Retoris	<p>14) Penggunaan Kata: “Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI”, “Wakil Sekjen PKB”, “gamang”</p> <p>15) Grafis: Foto</p>

## 2. Analisis Berita “Ketua DPD: Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Gubernur”

Berita yang dianalisis berikut masuk dalam jenis berita *indepht news* karena pemberitaan ini mengkaji secara mendalam tentang keputusan hak angket terhadap Ahok dengan pendapat dari Ketua DPD sebagai narasumber. Bila dilihat dari nilai berita, berita ini bernilai kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan dengan sudut pandang dari Ketua DPD. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Detik.com terhadap hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan hasil analisis struktur sintaksis, *headline* yang digunakan yaitu “Ketua DPD: Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Gubernur”. Dari *headline* tersebut kita sudah bisa melihat *frame* dari Detik.com yang menekankan bahwa DPRD DKI Jakarta dalam mengeluarkan hak angket terhadap Ahok tidak bermaksud untuk menjatuhkan Ahok yang sekaligus memberi citra yang positif kepada DPRD. Hal ini diperkuat dengan mencantumkan kutipan pernyataan dari ketua DPD sebagai judul dari pemberitaannya. Judul dengan mencantumkan kutipan pernyataan seperti ini apalagi dari tokoh yang memang mempunyai kedudukan penting di parlemen tentunya akan membuat khalayak lebih percaya terhadap pemberitaan Detik.com dan seakan menepis berbagai alasan lain dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok.

Setelah judul, disambung oleh *lead*

Anggota DPRD DKI saat ini sedang menggulirkan hak angket untuk menyelidiki persoalan APBD 2015 yang membuat hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak harmonis. Ketua DPD Irman Gusman mengingatkan bahwa hak angket tidak boleh untuk menjatuhkan gubernur DKI.

*Lead* diatas sudah berisi gambaran umum tentang isi berita. Pertama-tama Detik.com membawa arah pemikiran pembaca kepada hubungan antara DPRD DKI Jakarta dan Ahok yang kurang harmonis dikarenakan hak angket dan selanjutnya memberikan pernyataan bahwa hak angket tersebut tidak boleh untuk menjatuhkan Gubernur Ahok. Dengan begitu bisa dilihat bahwa Detik.com menepis adanya usaha dari DPRD untuk menjatuhkan Ahok. Detik.com pada **latar informasi** memberikan pandangan dari Irman Gusman yang mengatakan hak angket adalah sah dilakukan sesuai dengan fungsi dari hak angket. Berikut latar informasinya yang dicantumkan:

“Ia mengatakan hak angket adalah hak yang dimiliki anggota DPR dan sah-sah saja dilakukan. Hanya saja, ia mengingatkan fungsi hak angket itu yakni menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai melanggar undang-undang”

Untuk memperkuat *framingnya*, Detik.com menggunakan narasumber Ketua DPD Irman Gusman. Dengan mencantumkan **kutipan sumber** dari Irman Gusman maka Detik.com mencoba memperlihatkan bahwa beritanya merupakan fakta dan terpercaya karena narasumber yang digunakan mempunyai kapasitas yang sangat kompeten sebagai pelaku politik, dan sebagai Ketua DPD.

Berikut **pernyataan** dari narasumber yang digunakan sebagai kutipan dalam berita Detik.com:

"Kalau hak anget hanya untuk melihat benar atau tidak, silakan tapi bukan untuk jatuhkan gubernur ya. Supaya orang jadi terbuka,"

"Tentu harus tidak perlu merugikan rakyat karena waktunya sudah terlambat, gubernur harus mengeluarkan Pergub untuk tetap bisa lanjutkan APBD 2014, Pergub itu supaya ada payung hukum biar APBD 2014 bisa dilaksanakan, sehingga masalah ini tak ganggu pelayanan masyarakat,"

Dari semua pernyataan diatas, memperlihatkan bahwa hak angket bukan untuk jatuhkan Gubernur dan tidak perlu merugikan rakyat sehingga pernyataan tersebut sekaligus mempertegas *frame* dari Detik.com. Pernyataan kedua dijadikan **penutup** berita oleh Detik.com. Dengan menempatkan pernyataan sebagai penutup, Detik.com menyampaikan apa yang menjadi harapan dari Irman Gusman dan Detik.com sendiri dalam menyelesaikan hak angket ini. Dengan begitu pembaca bisa memahami langkah yang dilakukan DPRD bukan untuk menjatuhkan Ahok dan hak angket tidak akan merugikan rakyat.

*Frame* Detik.com juga bisa dilihat pada struktur skrip. Berdasarkan analisis **skrip**, berita ini mengisahkan pandangan terhadap hak angket yang bukan untuk menjatuhkan Ahok (*what*). Pandangan ini dikemukakan oleh Irman Gusman selaku ketua DPD (*who*). Pernyataan Irman Gusman tersebut disampaikan di Senayan City, Jakarta Pusat (*where*) pada hari Minggu, 8 Maret 2015 (*when*). Unsur *why* pada berita ini adalah, karena hak angket hanya untuk melihat benar atau tidak. Sementara itu tidak terdapat unsur *how* pada berita ini. Dengan begitu melalui unsur skrip ini, Detik.com hanya menekankan pada pernyataan Irman

Gusman sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tanpa menjelaskan bagaimana hak angket.

*Frame* dari Detik.com dapat jelas dilihat pada struktur tematik. Berdasarkan analisis unsur **tematik**, tema yang diangkat Detik.com adalah hak angket bukan untuk jatuhkan Gubernur dan tidak merugikan masyarakat. Tema ini didukung dengan teknik penyusunan paragraf dalam berita yang mencantumkan pernyataan narasumber dalam teks berita yang semuanya mengarah pada penjelasan-penjelasan logis untuk memperlihatkan tema yang dibawa dalam berita dengan kata lain pernyataan Irman Gusman yang dicantumkan dalam teks berita adalah pendukung tema yang dibawa.

Tema ini juga dapat dilihat pada penggunaan **koherensi penjelas** pada kalimat “ Anggota DPRD DKI saat ini sedang menggulirkan hak angket untuk menyelidiki persoalan APBD 2015 **yang** membuat hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak harmonis. Dengan penggunaan kata hubung “yang” pada kalimat tersebut, Detik.com memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa hubungan antara DPRD DKI dan Gubernur DKI saat ini sedang tidak harmonis. Namun selanjutnya ditemukan **koherensi pembeda** pada pernyataan Irman Gusman berikut: “Kalau hak angket hanya untuk melihat benar atau tidak, silahkan **tapi** bukan untuk jatuhkan gubernur ya”. Koherensi pembeda tersebut memperlihatkan bahwa hak angket untuk melihat benar atau tidaknya Ahok dalam kisruh RAPBD 2015 adalah tujuan dari hak angket dan menekankan bukan untuk jatuhkan Ahok walaupun hubungan DPRD dan Ahok tidak harmonis.



Unsur terakhir yang dianalisis adalah unsur **retoris**. Dari hasil analisis, Detik.com dalam menekankan fakta dapat dilihat pada judul yang digunakan. Pencantuman kata “Ketua DPD” dalam judulnya menekankan apa yang disampaikan pada pemberitaannya adalah fakta dengan klaim otoritas kedudukan tinggi dalam parlemen. Ketua DPD dilihat sebagai tokoh yang memang paham tentang hak angket karena kedudukannya sebagai pelaku politik yang secara langsung terlibat dalam urusan parlementer. Penekanan ini juga dilakukan dengan menampilkan foto Irman Gusman dalam beritanya sebagai perangkat *framing* grafis. Berikut foto yang ditampilkan:

Gambar 3.2

Foto pada berita “Ketua DPD: Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Gubernur”



Setelah dianalisis pada berita ini, Detik.com memberikan pandangan mereka terhadap hak angket. Dalam berita ini pandangan Detik.com dikonstruksi secara positif pada berita yang memberikan pernyataan dari ketua DPD terhadap hak angket sehingga *frame* yang dibuat adalah hak angket bukan untuk jatuhkan Ahok dan tidak perlu merugikan rakyat. Hal ini memperlihatkan posisi Detik.com

yang setuju terhadap keputusan DPRD DKI Jakarta mengeluarkan hak angket untuk Ahok.

**Frame: Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Ahok dan Tidak Perlu Merugikan Rakyat**

Tabel 3.3

Sajian Analisis Berita “Ketua DPD: Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Gubernur”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Headline</i>: Ketua DPD: Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Gubernur</li> <li>2) <i>Lead</i>: Anggota DPRD DKI saat ini sedang menggulirkan hak angket untuk menyelidiki persoalan APBD 2015 yang membuat hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak harmonis. Ketua DPD Irman Gusman mengingatkan bahwa hak angket tidak boleh untuk menjatuhkan gubernur DKI.</li> <li>3) <i>Latar Informasi</i>: Ia mengatakan hak angket adalah hak yang dimiliki anggota DPR dan sah-sah saja dilakukan. Hanya saja, ia mengingatkan fungsi hak angket itu yakni menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai melanggar undang-undang.</li> <li>4) <i>Sumber</i>: Ketua DPD Irman Gusman</li> <li>5) <i>Pernyataan</i>:  “Kalau hak anget hanya untuk melihat benar atau tidak, silakan tapi bukan untuk jatuhkan gubernur ya. Supaya orang jadi terbuka,”   “Tentu harus tidak perlu merugikan rakyat karena waktunya sudah terlambat, gubernur harus mengeluarkan Pergub untuk tetap bisa lanjutkan APBD 2014, Pergub itu supaya ada payung hukum biar APBD 2014 bisa dilaksanakan, sehingga masalah ini tak ganggu pelayanan masyarakat,”</li> <li>6) <i>Penutup</i>: “Tentu harus tidak perlu merugikan rakyat karena waktunya sudah terlambat, gubernur harus mengeluarkan Pergub untuk tetap bisa lanjutkan APBD 2014, Pergub itu</li> </ol>

	supaya ada payung hukum biar APBD 2014 bisa dilaksanakan, sehingga masalah ini tak ganggu pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Skrip	7) <i>What</i> : Pandangan yang memperlihatkan hak angket bukan untuk menjatuhkan Ahok 8) <i>Who</i> : Irman Gusman 9) <i>Why</i> : Karena hak angket hanya untuk melihat benar atau tidak 10) <i>Where</i> : Senayan City, Jakarta Pusat 11) <i>When</i> : Minggu, 8 Maret 2015 12) <i>How</i> : -
Tematik	13) Hak angket bukan untuk jatuhkan Ahok dan tidak perlu merugikan rakyat
Retoris	14) Penggunaan kata: “Ketua DPD” 15) Grafis: Foto Irman Gusman

### 3. Analisis Berita “Hadiri Rapat Revitalisasi Kota Tua Jadi Alasan Tim Angket Panggil Istri Ahok”

Berita ini masuk dalam jenis berita *indepth news* yang mengkaji secara mendalam dari sudut pandang tim angket DPRD DKI terkait proses berjalannya hak angket dimana tim angket berencana memanggil istri Ahok. Bila dilihat dari nilai berita, berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Detik.com terhadap proses berjalannya penyelidikan hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis struktur **sintaksis**, **headline** yang digunakan adalah “Hadiri Rapat Revitalisasi Kota Tua Jadi Alasan Tim Angket Panggil Istri Ahok”,

Detik.com melalui judulnya menekankan alasan dipanggilnya istri Ahok oleh tim angket pada judul. Pemanggilan istri Ahok dikarenakan sebelumnya istri Ahok pernah menghadiri rapat revitalisasi kota tua sehingga hal ini berarti sekaligus Detik.com berusaha mencegah adanya asumsi-asumsi lain dari masyarakat terkait pemanggilan istri Ahok oleh tim angket.

Pada *lead* yang digunakan Detik.com menginformasikan kepada pembaca bahwa tim angket DPRD DKI saat ini sedang memanggil pihak terkait dari Pemprov DKI dan DPRD untuk menyelidiki APBD 2015 dan akan memanggil Veronica Tan yang merupakan istri Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama. Dengan begitu *lead* yang digunakan awalnya memberikan sudut pandang kepada pembaca bahwa tim angket memanggil pihak terkait untuk menyelidiki APBD 2015 dan salah satu pihak yang terkait adalah istri Ahok karena berkaitan dengan kehadirannya pada rapat revitalisasi kota tua.

Detik.com menjelaskan revitalisasi kota tua berhubungan dengan salah satu program pembangunan kota Jakarta dan menyangkut anggaran (APBD) maka hal tersebut berarti Detik.com berusaha membawa pandangan pembaca bahwa Istri Ahok terlibat soal anggaran dan pemanggilannya adalah sesuai dengan tujuan pembentukan tim angket. Hal ini digunakan sebagai latar informasi dalam beritanya. Berikut **latar informasi** yang digunakan:

Menurut Tim Angket, karena berhubungan dengan salah satu program pembangunan kota Jakarta dan menyangkut anggaran maka dia menilai tak ada yang salah dengan pemanggilan tersebut

Dalam teks berita ini, **kutipan sumber** yang digunakan oleh Detik.com adalah anggota tim Angket DPRD Tubagus Arif dan Prabowo Soenirman, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Berikut **pernyataan** dari Tubagus Arif:

"Dalam pertemuan bisa membahas anggaran APBD soal program belanja revitalisasi museum Kota Tua. Itu kan anggarannya ada di Dinas Pariwisata. Kok selevel istri gubernur membahas anggaran. Ada apa?"

"Karena untuk melakukan investigasi dan ini berkaitan dengan anggaran dan kita sedang menyelidiki kejanggalan di APBD 2015 karena itu dia (Veronica) kita panggil. Kita bisa panggil seluruh pihak terkait bahkan seorang ahli loh. Jadi apa yang salah?"

Dari pernyataan diatas, Tubagus Arif sebagai anggota tim angket mengemukakan alasan mereka memanggil istri Ahok. Dengan begitu Detik.com menekankan pemanggilan istri Ahok bukanlah sesuatu yang salah dan itu sangat wajar dilakukan. Untuk lebih memperkuat *framingnya* terkait alasan pemanggilan istri Ahok, Detik.com kembali memasukan pernyataan Prabowo Soenirman yang juga merupakan tim angket. Berikut pernyataannya:

"Mungkin soal rapat-rapat yang dilakukan dengan SKPD,"

Dengan mencantumkan pernyataan dari dua anggota tim angket, Detik.com secara langsung menekankan kepada pembaca bahwa semua anggota tim angket DPRD searah dan sepemikiran terkait pemanggilan istri Ahok. Selanjutnya pernyataan terakhir yang dicantumkan dalam teks beritanya adalah dari Ahok. Detik.com menempatkan pernyataan Ahok sebagai **penutup** dari beritanya. Berikut pernyataan yang dicantumkan:

"Panggil alasan apa? Masalah apa? Angket anggaran panggil istri saya dasarnya apa? Iya dong. Harusnya bikin panitia angket khusus memanggil istri Gubernur,"

Terlihat dari pernyataan diatas bahwa Ahok tidak senang dengan pemanggilan istrinya oleh tim angket. Ahok pun menanyakan alasan pemanggilan istrinya. Namun dalam berita ini sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Ahok itu. Jadi melalui pernyataan Ahok yang ditempatkan sebagai penutup beritanya, Detik.com memberikan gambaran kepada para pembaca terhadap reaksi dan tanggapan Ahok dengan pemanggilan istrinya tersebut.

*Frame* Detik.com juga bisa dilihat pada unsur skrip. Berdasarkan analisis struktur **skrip**, berita ini mengisahkan tentang alasan pemanggilan istri Ahok oleh tim angket pada proses penyelidikan hak angket (*what*). Pemanggilan istri Ahok ternyata berkaitan dengan kehadirannya pada rapat revitalisasi kota tua yang berhubungan dengan anggaran (*why*) pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 (*when*) di Balai Kota (*where*). Alasan tersebut dikemukakan oleh Tubagus Arif (*who*). Unsur *how* dalam berita ini dapat dilihat pada paragraf ketiga yang menjelaskan bagaimana kehadiran istri Ahok pada rapat revitalisasi Kota Tua yang diketahui dari foto yang beredar.

*Frame* Detik.com dapat dilihat jelas pada unsur tematik. Tema yang diangkat oleh Detik.com adalah proses penyelidikan hak angket yang memanggil istri Ahok sudah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok. Tema ini didukung dengan penggunaan perangkat framing koherensi, kata ganti, dan detail. Berdasarkan analisis struktur **tematik**, pada kalimat "Menurut Tim Angket, **karena** berhubungan dengan salah satu program pembangunan kota

Jakarta **dan** menyangkut anggaran maka dia menilai tak ada yang salah dengan pemanggilan tersebut”, terdapat dua koherensi sekaligus yang digunakan. Yang pertama adalah **koherensi sebab akibat** pada kata hubung “**karena**”. Dengan penggunaan koherensi tersebut, Detik.com memberikan alasan penyebab pemanggilan istri Ahok oleh tim angket yang dikarenakan berhubungan dengan salah satu program pembangunan kota Jakarta. Koherensi kedua adalah **koherensi penjelas** pada kata hubung “**dan**”. Kata hubung tersebut sekali lagi menekankan penjelasan pada aspek alasan pemanggilan istri Ahok yang bukan cuma dikarenakan satu alasan namun dua alasan yang dihubungkan pada satu kalimat. Dengan begitu Detik.com menekankan bahwa pemanggilan istri Ahok tersebut mempunyai dasar alasan yang kuat.

Detik.com untuk lebih menekankan alasan pemanggilan istri Ahok tersebut adalah benar adanya, diberikan perangkat *framing detail* pada paragraf ketiga dalam teks berita. Dijelaskan secara rinci gambaran rapat panitia revitalisasi kota tua yang dihadiri oleh istri Ahok. Selain itu terdapat kata ganti “**kita**” pada pernyataan narasumber di paragraf kelima. Kata kita yang digunakan mewakili seluruh tim angket. Dengan penggunaan kata ganti seperti ini, alasan pemanggilan istri Ahok tersebut bukan hanya disetujui oleh beberapa orang tim angket, namun juga keseluruhan tim angket.

Unsur terakhir untuk melihat Detik.com menekankan *framenya* adalah unsur retorik. Berdasarkan analisis unsur **retoris**, terdapat penggunaan kata “kejanggalan” dari kata dasar “janggal” yang artinya: tidak biasanya; tidak menurut kebiasaan (<http://kbbi.web.id/janggal>, diakses tanggal 24 Desember

2015, pukul 22.44 WIB). Kata ini digunakan untuk menekankan APBD 2015 yang diluar dari kebiasaan sebelumnya dalam APBD, sekaligus untuk menekankan tujuan awal dari dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok yakni masalah APBD.

Terdapat juga perangkat *framing* grafis dalam bentuk foto istri Ahok. Berikut foto yang dicantumkan:

Gambar 3.3

Foto pada berita “Hadiri Rapat Revitalisasi Kota Tua Jadi Alasan Tim Angket Panggil Istri Ahok”



Foto diatas bisa dikatakan memperlihatkan pemberitaan yang melibatkan Veronica Tan (istri Ahok) sekaligus memberikan penekanan pada aspek berita yang disampaikan.

Setelah dianalisis, pada berita ini Detik.com memberikan pandangan mereka terhadap proses penyelidikan hak angket dimana tim angket akan memanggil istri Ahok untuk di investigasi. Detik.com merekonstruksi hal tersebut



dengan memberikan alasan pada berita ini mengapa tim angket akan memanggil istri Ahok dalam proses penyelidikan, dengan kata lain Detik.com berusaha meyakinkan pembaca bahwa hal tersebut adalah benar sekaligus membenarkan langkah tim angket DPRD DKI tersebut. Sehingga, *frame* yang dibuat Detik.com menyangkut proses hak angket bahwa pemanggilan istri Ahok sudah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya hak angket. Dengan begitu bisa dikatakan Detik.com setuju terhadap pemanggilan Istri Ahok.

**Frame: Pemanggilan istri Ahok sudah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok**

Tabel 3.4

Sajian Analisis Berita “Hadiri Rapat Revitalisasi Kota Tua Jadi Alasan Tim Angket Panggil Istri Ahok”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Headline</i>: Hadiri Rapat Revitalisasi Kota Tua Jadi Alasan Tim Angket Panggil Istri Ahok</li> <li>2) <i>Lead</i>: Memberikan sudut pandang bahwa tim angket DPRD DKI saat ini sedang memanggil pihak terkait dari Pemprov DKI dan DPRD untuk menyelidiki APBD 2015 dan akan memanggil Veronica Tan yang merupakan istri Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama</li> <li>3) Latar Informasi: Menurut Tim Angket, karena berhubungan dengan salah satu program pembangunan kota Jakarta dan menyangkut anggaran maka dia menilai tak ada yang salah dengan pemanggilan tersebut</li> <li>4) Sumber: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tim Angket Tubagus Arif</li> <li>b) Tim Angket Prabowo Soenirman</li> <li>c) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama</li> </ol> </li> <li>5) Pernyataan: <p>“Dalam pertemuan bisa membahas anggaran APBD soal program belanja revitalisasi museum Kota Tua. Itu kan</p> </li> </ol>

	<p>anggarannya ada di Dinas Pariwisata. Kok selevel istri gubernur membahas anggaran. Ada apa?,”</p> <p>“Karena untuk melakukan investigasi dan ini berkaitan dengan anggaran dan kita sedang menyelidiki kejanggalkan di APBD 2015 karena itu dia (Veronica) kita panggil. Kita bisa panggil seluruh pihak terkait bahkan seorang ahli loh. Jadi apa yang salah?”</p> <p>“Mungkin soal rapat-rapat yang dilakukan dengan SKPD,”</p> <p>“Panggil alasan apa? Masalah apa? Angket anggaran panggil istri saya dasarnya apa? Iya dong. Harusnya bikin panitia angket khusus memanggil istri Gubernur,”</p> <p>6) Penutup: “Panggil alasan apa? Masalah apa? Angket anggaran panggil istri saya dasarnya apa? Iya dong. Harusnya bikin panitia angket khusus memanggil istri Gubernur,” kata Ahok kepada wartawan di kantornya, Kamis (12/3).</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : Alasan pemanggilan istri Ahok oleh tim angket pada proses penyelidikan hak angket</p> <p>8) <i>Who</i> : Tubagus Arif</p> <p>9) <i>Why</i> : Berkaitan dengan kehadirannya pada rapat revitalisasi kota tua yang berhubungan dengan anggaran</p> <p>10) <i>Where</i> : Balai Kota</p> <p>11) <i>When</i> : Kamis, 5 Maret 2015</p> <p>12) <i>How</i> : Kehadiran Veronica diketahui dari foto rapat yang beredar luas. Dalam foto itu terlihat Veronica duduk di kursi pimpinan bersama adik Ahok Harry Basuki dan Deputi Gubernur bidang Pariwisata Sylviana Murni. Keberadaan Veronica dibenarkan oleh Sylviana dengan mengatakan bahwa ibu 3 anak itu hanya datang untuk berdiskusi dengan tim revitalisasi Kota Tua.</p>
Tematik	13) Proses penyelidikan hak angket yang memanggil istri Ahok sudah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok
Retoris	<p>14) Penggunaan kata: “Kejanggalkan”</p> <p>15) Grafis: Foto Veronica Tan</p>

#### **4. Analisis Berita “DPRD Fokus Bahas Evaluasi APBD, Pemeriksaan Angket Ahok Tertunda”**

Berita ini masuk kedalam jenis berita *indepth news* dikarenakan masih memberitakan pengembangan peristiwa hak angket dari pandangan anggota tim angket DPRD DKI dimana proses penyelidikannya yang tertunda. Bila dilihat dari nilai berita, berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Detik.com terhadap proses berjalannya penyelidikan hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis **sintaksis**, Detik.com menggunakan **headline** “DPRD Fokus Bahas Evaluasi APBD, Pemeriksaan Angket Ahok Tertunda”. Judul tersebut mencoba memberikan alasan kepada pembaca terhadap penyelidikan Ahok yang tertunda. Dengan begitu Detik.com memperlihatkan tim angket tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap Ahok terkait hak angket hanya saja harus tertunda di karenakan DPRD sedang fokus membahas evaluasi APBD DKI Jakarta.

Setelah judul tersebut , disambung dengan **lead**:

Tim Hak Angket DPRD DKI sudah memeriksa sejumlah pihak untuk menyelidiki kisruh anggaran APBD 2015 DKI sejak pekan lalu. Namun kini, jalannya Tim Angket berhenti sementara karena DPRD fokus di pembahasan evaluasi APBD bersama Pemprov DKI.

Dari *Lead* tersebut, Detik.com kembali menekankan kepada pembaca alasan tertundanya hak angket dan menyatakan bahwa tim hak angket sudah melakukan langkah-langkah terkait hak angket. Pemberian pernyataan seperti ini mencoba melakukan pembenaran dan menepis adanya isu-isu miring terhadap tim angket yang menunda penyelidikan. *Lead* tersebut sudah terbilang bagus karena memberikan gambaran berita secara keseluruhan.

**Latar informasi** yang digunakan dalam berita ini tentang kapan pemeriksaan terakhir kali yang dilakukan sebelum ditunda oleh tim angket. Berikut latar informasi yang dicantumkan dalam teks beritanya:

Tim Angket terakhir kali melakukan pemeriksaan pada Jumat (13/3) pekan lalu. Setelah itu, Inggard menuturkan bahwa belum ada rapat internal lagi di Tim Angket.

Selanjutnya **kutipan sumber** dalam berita ini adalah wakil ketua tim angket Inggard Joshua. Dengan begitu Detik.com mencoba melakukan klarifikasi secara langsung dengan pihak terkait dengan tertundanya pemeriksaan hak angket. Berikut **pernyataan** dari Inggard Joshua yang dicantumkan dalam teks berita:

“Karena sebagian anggota angket terlibat di pembahasan anggaran (Badan Anggaran), jadi tertunda,”

“Kita belum rapat internal lagi. Mungkin Jumat (20/3),”

“Sedang diupayakan. Sekarang baru dua minggu. Kita tidak mau berlambat-lambat,”

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa Inggard Joshua memberikan alasan tertundanya pemeriksaan dan mereka tidak mau berlambat-lambat dalam melakukan penyelidikan hak angket. Detik.com mencantumkan pernyataan seperti

ini untuk mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang berbeda terkait tertundanya pemeriksaan angket Ahok.

Terakhir dari struktur sintaksis adalah **penutup**. Detik.com dalam teks beritanya mencantumkan penutup sebagai berikut:

Banggar DPRD DKI saat ini memang sedang duduk bersama dengan Pemprov DKI untuk membahas evaluasi APBD yang dikembalikan oleh Kemendagri. Pembahasan itu memiliki tenggat waktu hingga Jumat (20/3).

Dari penutup diatas, Detik.com menginformasikan bahwa pada kenyataannya saat ini badan anggaran DPRD sedang membahas evaluasi APBD bersama Pemprov DKI dan memiliki tenggang waktu. Jadi melalui penutupnya, Detik.com menekankan bahwa tertundanya pemeriksaan angket Ahok adalah sangat wajar sesuai dengan kesibukan DPRD.

Berdasarkan analisis struktur **skrip**, berita ini mengisahkan alasan tertundanya proses pemeriksaan hak angket (*what*) yang dikarenakan sebagian anggota tim angket terlibat di pembahasan evaluasi APBD (*why*). Alasan tersebut dikemukakan oleh Inggard Joshua selaku Wakil Ketua Tim Angket (*who*) pada hari Kamis, 19 Maret 2015 (*when*). Tidak terdapat unsur *where* dan *how* pada berita ini. Pada struktur ini Detik.com lebih menonjolkan pada *what*, *why*, *who*, dan *when* untuk memperlihatkan alasan dari tertundanya hak angket.

Selanjutnya struktur yang dianalisis adalah struktur **tematik**. Struktur ini dianalisis untuk melihat tema yang ingin disampaikan dalam berita ini. Berdasarkan hasil analisis, ada dua tema yang ingin disampaikan Detik.com. Tema yang pertama adalah alasan tertundanya penyelidikan hak angket. Tema ini bisa

dilihat dengan penggunaan **koherensi sebab akibat** pada kalimat “Namun kini, jalannya Tim Angket berhenti sementara **karena** DPRD fokus di pembahasan evaluasi APBD bersama Pemprov DKI”. Kata hubung “**karena**” yang digunakan membawa pesan penyebab tertundanya pemeriksaan hak angket. Kita bisa melihat dari penggunaan perangkat framing koherensi sebab akibat pada pemberitaannya Detik.com mengkomunikasikan apa yang menjadi alasan-alasan pihak DPRD terkait tertundanya pemeriksaan hak angket.

Tema yang kedua adalah tim angket akan menyelesaikan penyelidikan hak angket secepatnya. Tema ini diperlihatkan dengan memberikan **koherensi pembeda** pada kalimat “Tim Angket memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan penyelidikan, **namun** Inggard yakin akan selesai lebih cepat”. Kata hubung “**namun**” disini dijadikan pembeda dari waktu 60 hari yang digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan dan memperlihatkan bahwa DPRD bisa melakukan penyelidikan secepatnya tanpa harus menunggu waktu 60 hari.

Selain itu terdapat juga kata ganti “**kita**” pada pernyataan dari narasumber. Penggunaan kata kita ini membawa makna keseluruhan dari tim angket. Pada pernyataan “**Kita** tidak mau berlambat-lambat” terlihat bahwa bukan hanya narasumber atau satu orang saja yang menginginkan percepatan penyelidikan hak angket, namun juga membawa makna keseluruhan anggota tim angket yang dibentuk.

*Frame* Detik.com juga bisa dilihat pada struktur **retoris**, dimana Detik.com menekankan fakta. Pada paragraf terakhir berita, Detik.com

menekankan fakta dengan pernyataan yang pada kenyataannya banggar DPRD DKI saat ini memang sedang duduk bersama dengan Pemprov DKI untuk membahas evaluasi APBD. Penggunaan kata “memang” menekankan fakta yang sebenarnya dan yang sedang terjadi. Agar lebih meyakinkan fakta Detik.com juga menggunakan grafis foto. Berikut foto dalam pemberitaan ini:

Gambar 3.4

Foto pada berita “DPRD Fokus Bahasa Evaluasi APBD, Pemeriksaan Angket Ahok Tertunda”



Dari foto terlihat jelas anggota DPRD yang sedang duduk bersama Pemprov DKI. Hal ini menekankan fakta bahwa apa yang diutarakan oleh Detik.com bukan hanya bersifat pernyataan semata, tapi juga didukung oleh grafis yang memperlihatkan gambaran peristiwa yang sesuai dengan *frame* yang dibuat.

Setelah dianalisis, pada berita ini Detik.com memberikan pandangan mereka terhadap proses penyelidikan hak angket. Detik.com melihat proses penyelidikan hak angket yang terhenti sementara bukan karena faktor kesengajaan, namun ada beberapa hal yang menyebabkan tertundanya proses

penyelidikan. Pandangan tersebut dikonstruksi pada berita ini dengan pernyataan dari tim angket yang memberikan alasan tertundanya proses penyelidikan. Secara umum *frame* yang dibuat Detik.com pada berita ini adalah “penyelidikan hak angket berhenti sementara dikarenakan tim angket sedang fokus bahas evaluasi APBD”. Hal ini berarti melalui beritanya Detik.com memberikan citra positif terhadap tim angket dengan memberikan alasan tertundanya penyelidikan hak angket.

**Frame: Penyelidikan hak angket berhenti sementara dikarenakan tim angket sedang fokus bahas evaluasi APBD**

Tabel 3.5

Sajian Analisis Berita “DPRD Fokus Bahasa Evaluasi APBD, Pemeriksaan Angket Ahok Tertunda”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	1) <i>Headline</i> : DPRD Fokus Bahas Evaluasi APBD, Pemeriksaan Angket Ahok Tertunda 2) <i>Lead</i> : Tim Hak Angket DPRD DKI sudah memeriksa sejumlah pihak untuk menyelidiki kisruh anggaran APBD 2015 DKI sejak pekan lalu. Namun kini, jalannya Tim Angket berhenti sementara karena DPRD fokus di pembahasan evaluasi APBD bersama Pemprov DKI. 3) <i>Latar Informasi</i> : Tim Angket terakhir kali melakukan pemeriksaan pada Jumat (13/3) pekan lalu. Setelah itu, Inggard menuturkan bahwa belum ada rapat internal lagi di Tim Angket. 4) <i>Sumber</i> : Wakil Ketua Tim Angket Inggard Joshua 5) <i>Pernyataan</i> : “Karena sebagian anggota angket terlibat di pembahasan anggaran (Badan Anggaran), jadi tertunda,”  “Kita belum rapat internal lagi. Mungkin Jumat (20/3),”



	<p>“Sedang diupayakan. Sekarang baru dua minggu. Kita tidak mau berlambat-lambat,”</p> <p>6) Penutup: Banggar DPRD DKI saat ini memang sedang duduk bersama dengan Pemprov DKI untuk membahas evaluasi APBD yang dikembalikan oleh Kemendagri. Pembahasan itu memiliki tenggat waktu hingga Jumat (20/3).</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : Tertundanya proses pemeriksaan hak angket</p> <p>8) <i>Who</i> : Wakil Ketua Tim Angket Inggard Joshua</p> <p>9) <i>Why</i> : Karena sebagian anggota tim angket terlibat di pembahasan evaluasi APBD</p> <p>10) <i>Where</i> : -</p> <p>11) <i>When</i> : 19 Maret 2015</p> <p>12) <i>How</i> : -</p>
Tematik	<p>13) Alasan tertundanya penyelidikan hak angket</p> <p>14) Tim angket akan menyelesaikan penyelidikan hak angket secepatnya</p>
Retoris	<p>15) Penggunaan kata: “memang”</p> <p>16) Grafis: Foto</p>

## 5. Analisis Berita “Tim Angket DPRD: Bisa Jadi Tak Perlu Panggil Ahok”

Perkembangan berita tentang peristiwa hak angket diberitakan dan dikaji pada berita ini dengan pendapat tim angket dimana dalam proses penyelidikannya tim angket tidak akan memanggil Ahok untuk dimintai keterangan sehingga berita ini masuk kedalam jenis berita *indepth news*. Nilai berita yang terkandung adalah kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Detik.com terhadap proses berjalannya penyelidikan hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis struktur **sintaksis**, *headline* yang digunakan Detik.com adalah “Tim Angket DPRD: Bisa Jadi Tak Perlu Panggil Ahok”. Judul tersebut menggambarkan *frame* awal yang ingin dibentuk Detik.com. Dengan mencantumkan kalimat “tim angket” pada judulnya seakan mempertegas bahwa hal tersebut adalah kebenaran yang didukung oleh pernyataan tim angket sendiri.

*Lead* yang digunakan dalam berita ini adalah sebagai berikut:

Tim angket DPRD DKI Jakarta terus bekerja usai APBD 2015 hampir pasti gagal terealisasi. Namun tim angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini membuka kemungkinan tidak akan memanggil Ahok untuk meminta keterangan.

Dari *lead* diatas terlihat bahwa tim angket kemungkinan tidak akan memanggil Ahok. *Lead* tersebut secara umum sudah dapat memberikan sudut pandang dari berita. **Latar informasi** yang digunakan pada teks berita ini adalah sebagai berikut:

Ahok tak harus diundang bila keterangan-keterangan yang didapat tim angket telah bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Ahok. Hari ini, rencananya Tim Angket segera menggelar rapat internal.

Latar informasi diatas membawa pandangan kepada khalayak bahwa Ahok tidak harus diundang apabila keterangan yang didapat telah bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Ahok. Disini Detik.com secara tidak langsung memperlihatkan Ahok adalah pihak yang terbukti bersalah apabila dia tidak diundang untuk dimintai keterangan oleh tim angket.

**Kutipan sumber** berita ini adalah anggota tim angket dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman. Berikut pernyataan dari Prabowo Soenirman yang dicantumkan dalam teks berita:

“Kita lihat evaluasi kita, kalau dirasa keterangan yang diperoleh sudah memenuhi maka Ahok tak perlu diundang,”

“Ahok sendiri bisa diundang, bisa tidak diundang. Tidak harus diundang,”

“Karena yang kita lihat adalah kesalahan-kesalahannya saja. Kalau kesalahan-kesalahannya ketemu, apalagi yang perlu diklarifikasi dari Ahok?”

Pernyataan yang dicantumkan dalam teks berita ini mengklaim validitas atau kebenaran dari *frame* yang dibuat oleh Detik.com bahwa pemanggilan Ahok itu adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan sekaligus dapat mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu dari pihak yang menyimpang. Semua pernyataan yang dicantumkan pada teks memperlihatkan alasan-alasan tidak perlu dipanggilnya Ahok untuk mempertegas *frame* dari Detik.com. Penegasan itu kembali diperlihatkan pada pernyataan terakhir yang dijadikan **penutup** berita.

Berdasarkan analisis pada struktur **skrip**, berita ini mengisahkan tim angket yang tidak akan memanggil Ahok dalam proses penyelidikan hak angket (*what*). Ahok tak harus dipanggil apabila keterangan-keterangan yang didapat tim angket telah bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Ahok (*why*). Alasan tersebut dikemukakan oleh Prabowo Soenirman (*who*) pada hari Senin, 23 Maret 2015 (*when*). Tidak terdapat unsur *where* dan *how* pada berita ini.

Berdasarkan analisis struktur **tematik**, tema yang dibawa Detik.com secara umum mewakili *frame* yang dibuat. Tema yang ditampilkan Detik.com

adalah proses penyelidikan hak angket tidak perlu melibatkan Ahok. Detik.com menampilkan fakta menggunakan perangkat-perangkat framing tematik yang keseluruhan merujuk pada penekanan aspek yang logis dengan pernyataan-pernyataan narasumber yang memang terlibat pada proses hak angket sebagai pembenaran akan proses tersebut. Perangkat *framing* yang digunakan antara lain Koherensi dan kata ganti.

Terdapat **koherensi pembeda** pada kalimat “Tim Angket DPRD DKI Jakarta terus bekerja usai APBD 2015 hampir pasti gagal terealisasi. **Namun**, tim angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini membuka kemungkinan tidak akan memanggil Ahok untuk meminta keterangan. Pada kalimat tersebut terdapat dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah Tim Angket yang terus bekerja usai APBD 2015 hampir pasti gagal terealisasi dan yang kedua adalah tim angket membuka kemungkinan tidak akan memanggil Ahok untuk meminta keterangan. Detik.com menggunakan kata hubung “namun” tersebut untuk membuat dua pernyataan yang berbeda tersebut menjadi satu dan berhubungan satu sama lain sehingga menciptakan makna walaupun APBD 2015 hampir pasti gagal terealisasi, tim angket tetap tidak akan memanggil Ahok untuk dimintai keterangan.

Penggunaan koherensi juga terdapat pada pernyataan “**Karena** yang kita lihat adalah kesalahan-kesalahannya saja. Kalau kesalahan-kesalahannya ketemu, apalagi yang perlu diklarifikasi oleh Ahok?”. Koherensi yang digunakan adalah **koherensi sebab akibat** dengan kata hubung “karena”. Koherensi tersebut memperlihatkan penyebab tidak dipanggilnya Ahok oleh tim angket.

Penyebabnya karena yang ingin dilihat kesalahan Ahok saja sehingga apabila kesalahannya sudah ditemukan maka Ahok tak harus dipanggil.

Terdapat kata ganti “**kita**” pada pernyataan narasumber, “Kita lihat evaluasi kita, kalau dirasa keterangan yang diperoleh sudah memenuhi maka Ahok tak perlu diundang”. Kata ganti tersebut menimbulkan makna bahwa seluruh tim angket sepakat tidak akan mengundang Ahok untuk dimintai keterangan apabila keterangan yang ada sudah memenuhi. Kata ganti “kita” juga terdapat pada pernyataan paragraf terakhir yang menimbulkan makna bahwa kesalahan-kesalahan Ahok dinilai sama dimata seluruh tim angket.

Struktur terakhir yang dianalisis adalah **retoris**. Pada struktur ini kita akan melihat bagaimana Detik.com menekankan fakta dalam beritanya. Berdasarkan analisis, penekanan fakta oleh Detik.com dapat dilihat pada judulnya. Penggunaan kata “Tim Angket DPRD” dalam judul menekankan fakta yang diberitakan adalah benar karena dinyatakan langsung oleh tim angket sendiri. Penekanan ini juga bisa dilihat pada foto yang ditampilkan pada beritanya. Foto yang ditampilkan adalah foto narasumber.

Gambar 3.5

Foto pada berita “Tim Angket DPRD: Bisa Jadi Tak Perlu Panggil Ahok”



Foto tersebut mengkomunikasikan siapa yang menjadi narasumber dalam berita sekaligus menekankan pada pembaca bahwa narasumber yang memang merupakan anggota tim angket DPRD.

Setelah dianalisis, pada berita ini, Detik.com memberikan pandangan terhadap proses penyelidikan hak angket. Detik.com dalam berita ini merekonstruksi bahwa tim angket tidak akan memanggil Ahok untuk dimintai keterangan dengan pemberian alasan dari tim angket langsung sebagai pihak yang menyelidiki untuk memberikan pembenaran hal tersebut. Detik.com melihat hal tersebut adalah hal yang logis dan berdasar dengan menyajikannya dalam bentuk berita untuk disampaikan, dengan kata lain Detik.com memihak kepada tim angket DPRD. Sehingga *framing* yang dibuat Detik.com. *Frame* berita ini adalah “Proses penyelidikan hak angket tidak perlu melibatkan Ahok”.

**Frame: Proses penyelidikan Hak angket tidak perlu melibatkan Ahok**

Tabel 3.6

Sajian Analisis Berita “Tim Angket DPRD: Bisa Jadi Tak Perlu Panggil Ahok”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<p>1) <i>Headline</i>: Tim Angket DPRD: Bisa Jadi Tak Perlu Panggil Ahok</p> <p>2) <i>Lead</i>: Tim angket DPRD DKI Jakarta terus bekerja usai APBD 2015 hampir pasti gagal terealisasi. Namun tim angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini membuka kemungkinan tidak akan memanggil Ahok untuk meminta keterangan.</p> <p>3) <i>Latar Informasi</i>: Ahok tak harus diundang bila keterangan-keterangan yang didapat tim angket telah bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Ahok. Hari ini, rencananya Tim Angket segera menggelar rapat internal.</p> <p>4) <i>Sumber</i>: Anggota tim angket dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman</p> <p>5) <i>Pernyataan</i>:  “Kita lihat evaluasi kita, kalau dirasa keterangan yang diperoleh sudah memenuhi maka Ahok tak perlu diundang,”   “Ahok sendiri bisa diundang, bisa tidak diundang. Tidak harus diundang,”   “Karena yang kita lihat adalah kesalahan-kesalahannya saja. Kalau kesalahan-kesalahannya ketemu, apalagi yang perlu diklarifikasi dari Ahok?”</p> <p>6) <i>Penutup</i>: “Karena yang kita lihat adalah kesalahan-kesalahannya saja. Kalau kesalahan-kesalahannya ketemu, apalagi yang perlu diklarifikasi dari Ahok?” tutur Prabowo.</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : Tim angket yang tidak akan memanggil Ahok dalam proses penyelidikan hak angket</p> <p>8) <i>Who</i> : Prabowo Soenirman</p> <p>9) <i>Why</i> : Ahok tak harus dipanggil apabila keterangan-keterangan yang didapat tim angket telah bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Ahok</p> <p>10) <i>Where</i> : -</p> <p>11) <i>When</i> : Senin, 23 Maret 2015</p> <p>12) <i>How</i> : -</p>

Tematik	13) Proses penyelidikan hak angket tidak perlu melibatkan Ahok
Retoris	14) Penggunaan kata: Tim Angket DPRD 15) Grafis: Foto Narasumber

## 6. Analisis Berita “Tim Angket akan Permasalahan Ucapan Ahok yang Dinilai Kasar”

Dalam peristiwa hak angket, salah satu yang menjadi dasar dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok adalah gaya bicara Ahok yang dinilai kasar oleh anggota DPRD DKI dan hal itu melanggar etika kepemimpinan. Berita ini memberitakan pendapat dari tim angket terhadap hal tersebut dan masih terkait pada permasalahan hak angket yang dikaji secara mendalam sehingga jenis berita ini adalah *indeph news*.

Bila dilihat dari nilai berita, berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan dengan sudut pandang dari Detik.com. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Detik.com terhadap hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis **sintaksis**, Detik.com menggunakan **Headline** “Tim Angket akan Permasalahan Ucapan Ahok yang Dinilai Kasar”. Dengan penggunaan judul seperti ini Detik.com memperlihatkan bahwa ucapan Ahok yang dinilai kasar pantas dipermasalahkan oleh tim angket dan diselidiki apakah berdampak pada masyarakat luas sesuai dengan tujuan hak angket itu sendiri.



Selanjutnya pada *Lead*, Detik.com memberikan sudut pandang dari berita bahwa panitia angket bukan hanya sekedar mempersoalkan dokumen RAPBD 2015 namun juga mempersoalkan etika Ahok yang dianggap menyalahi etika kepala daerah. Berikut *lead* dalam teks berita ini:

Ketua Panitia Angket DPRD DKI Muhammad 'Ongen' Sangaji dijadwalkan akan memanggil sejumlah tim ahli mulai Rabu (25/3) esok. Terkini panitia angket rupanya tak sekedar mempersoalkan dokumen RAPBD 2015, tetapi juga etika Ahok.

**Latar informasi** pada berita ini membawa sudut pandang pembaca bahwa kata-kata yang sering diucapkan oleh Ahok bermuatan kasar dan hal itulah yang menjadi dasar para panitia angket untuk mempermasalahkan etika Ahok. Bukan hanya DPRD yang beranggapan seperti itu, namun Jusuf Kalla juga yang sebagai Wakil Presiden sudah memberikan teguran terhadap Ahok perihal kata-kata kasar. Dengan begitu Detik.com memandang angket yang mempermasalahkan etika adalah sesuatu yang logis. Berikut latar informasi dalam teks berita Detik.com:

Masalah etika yang disorot oleh politisi Hanura itu terkait pilihan kata-kata Ahok yang seringkali bermuatan kasar dan tidak pantas. Ahok juga telah mendapat teguran dari Wapres Jusuf Kalla perihal kata-kata kasar yang kerap digunakannya.

Selanjutnya **kutipan sumber** yang digunakan Detik.com adalah ketua panitia angket DPRD DKI Muhammad 'Ongen' Sangaji. Berikut **pernyataan** dari Ongen Sangaji dalam berita ini:

“Tim angket mencari temuan, ada dugaan pelanggaran undang-undang terkait APBD, kemudian tentang etika dan norma,”

“Karena itu ucapan seorang pemimpin yang tidak pantas dicontoh, tentu akan dijadikan salah satu pertimbangan. Ada juga beberapa rekaman televisi lainnya yang kita punya. Berita-berita yang tertulis juga kita simpan,”

“(Ucapan kasar) bisa jadi contoh buruk untuk generasi ke depan. Apalagi di Jakarta kan jadi barometer. Pemimpin tentu tidak boleh sampai seperti itu,”

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ahok merupakan temuan dari tim angket dan sudah mempunyai bukti-buktinya. Detik.com menekankan ucapan kotor dari Ahok adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dicontoh. Semua pernyataan yang dicantumkan memperlihatkan bahwa kata kasar yang dianggap sebagai sesuatu yang salah sehingga hak angket soal etika adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh tim angket. Pernyataan ketiga dijadikan **penutup** berita oleh Detik.com. Dengan begitu Detik.com memberikan pandangan kepada para pembaca bahwa ucapan kotor dari Ahok jauh dari kapasitasnya sebagai pemimpin dan bisa menjadi contoh buruk untuk generasi kedepan sehingga pembaca dapat setuju dengan alasan DPRD untuk mempersoalkan etika dalam hak angket.

Berdasarkan analisis pada struktur **skrip**, berita ini mengisahkan tentang tim angket yang akan mempermasalahkan ucapan Ahok yang dinilai kasar (*what*). Alasan tim angket mempermasalahkan ucapan kasar Ahok karena sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kepanitiaan angket, yakni melakukan investigasi terhadap pelanggaran etika yang dilakukan Ahok sebagai seorang pemimpin (*why*). Hal tersebut dikemukakan oleh Ongen Sangaji selaku ketua tim angket (*who*) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 (*when*) di gedung DPRD DKI Jakarta (*where*). Unsur *how* pada berita ini terdapat pada paragraf keenam

yang menjelaskan bagaimana seharusnya seorang pemimpin DKI berperilaku tanpa harus berbicara kasar.

Berdasarkan analisis struktur **tematik**, tema yang ditampilkan adalah alasan tim angket permasalahan ucapan Ahok yang dinilai kasar untuk menekankan bahwa hak angket soal etika adalah sesuatu yang benar dan logis. Tema yang digunakan bisa dilihat pada perangkat framing yang digunakan pada unsur tematik yakni penggunaan koherensi. Terdapat **koherensi penjelas** pada kalimat “Masalah etika yang disorot oleh politisi Hanura itu terkait pilihan kata-kata Ahok **yang** seringkali bermuatan kasar **dan** tidak pantas”. Kata “yang” tersebut memberi penjelasan pilihan kata-kata Ahok yang bermuatan kasar, kemudian disambung dengan kata “dan” yang memberi penjelasan bahwa kata-kata Ahok yang bermuatan kasar adalah sesuatu yang tidak pantas.

Terdapat juga **koherensi pembeda** pada kalimat “Meski beberapa kali Ahok juga sudah menyatakan permohonan maafnya melalui media, **namun** hal itu tetap akan dipermasalahkan oleh panitia angket”. Dengan begitu kita bisa melihat bahwa Detik.com menekankan bahwa permintaan maaf tersebut tidak akan mempengaruhi tim angket untuk mempersoalkan masalah etika. Kalimat pada koherensi pembeda tersebut lalu disambung dengan **koherensi sebab akibat** dengan kata hubung “**karena**” pada pernyataan narasumber diparagraf selanjutnya sebagai penyebab mengapa tim angket tetap akan mempersoalkan etika Ahok.

Detik.com dalam menekankan fakta juga bisa dilihat pada analisis struktur retorik berita. Berdasarkan analisis struktur **retoris**, terdapat kata “bahasa toilet” pada kalimat “Menurut Ongen, apapun alasannya, sebagai sebagai orang nomor satu di DKI tidak sepatutnya bicara kasar, termasuk meggunakan “bahasa toilet” sekalipun”. Kata toilet dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kamar kecil (kakus=tempat buang air; jamban) tempat untuk membuang kotoran (<http://kbbi.web.id/toilet-2>, diakses tanggal 2 November 2015, pukul 13.09 WIB), sehingga hal tersebut adalah sesuatu yang kotor. Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan dan memberi makna bahwa kata-kata yang diucapkan adalah kotor layaknya toilet yang biasanya sebagai tempat untuk membuang kotoran.

Selain itu, kata bahasa toilet tersebut diberi tanda kutip oleh Detik.com sebagai perangkat framing **grafis**. Tanda kutip tersebut digunakan untuk menekankan arti kata tersebut dan menginginkan pembaca menaruh perhatian pada kata tersebut. Untuk menekankan bahwa ucapan Ahok adalah sesuatu yang harus dipermasalahkan, terdapat juga kata “ucapan kasar” yang diberi tanda dalam kurung sebagai grafis untuk menekankan bahwa kata Ahok bukan cuma kotor, melainkan juga kasar. Grafis yang digunakan juga adalah foto narasumber, sebagai penekanan untuk diperlihatkan kepada pembaca bahwa yang menjadi narasumber adalah Ongen Sangaji sebagai ketua tim angket. Berikut foto narasumber yang dimuat:

Gambar 3.6

Foto pada berita “Tim Angket akan Permasalahkan Ucapan Ahok yang Dinilai Kasar”



Setelah dianalisis, pada berita ini Detik.com memberikan pandangan mereka terhadap hak angket yang didalamnya mempersoalkan etika Ahok. Detik.com merekonstruksi hal tersebut pada berita ini dengan pemberian pernyataan dari tim angket bahwa memang hal tersebut adalah wajar karena mereka mempunyai bukti-bukti yang memperlihatkan ucapan-ucapan Ahok yang dianggap kasar. Selain itu hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal pengguliran hak angket untuk Ahok. Dengan begitu *Frame* yang dibuat dalam berita ini “Hak angket soal etika adalah hal yang wajar karena sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kepanitiaan angket”.

**Frame: Hak angket soal etika adalah hal yang wajar karena sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kepanitiaan angket**

Tabel 3.7

Sajian Analisis Berita “Tim Angket akan Permasalahan Ucapan Ahok yang Dinilai Kasar”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<p>1) <i>Headline</i>: Tim Angket akan Permasalahan Ucapan Ahok yang Dinilai Kasar</p> <p>2) <i>Lead</i>: Ketua Panitia Angket DPRD DKI Muhammad 'Ongen' Sangaji dijadwalkan akan memanggil sejumlah tim ahli mulai Rabu (25/3) esok. Terkini panitia angket rupanya tak sekadar mempersoalkan dokumen RAPBD 2015, tetapi juga etika Ahok.</p> <p>3) Latar Informasi: Masalah etika yang disorot oleh politisi Hanura itu terkait pilihan kata-kata Ahok yang seringkali bermuatan kasar dan tidak pantas. Ahok juga telah mendapat teguran dari Wapres Jusuf Kalla perihal kata-kata kasar yang kerap digunakannya.</p> <p>4) Sumber: Ketua Panitia Angket DPRD DKI Muhammad 'Ongen' Sangaji</p> <p>5) Pernyataan:  “Tim angket mencari temuan, ada dugaan pelanggaran undang-undang terkait APBD, kemudian tentang etika dan norma”   “Karena itu ucapan seorang pemimpin yang tidak pantas dicontoh, tentu akan dijadikan salah satu pertimbangan. Ada juga beberapa rekaman televisi lainnya yang kita punya. Berita-berita yang tertulis juga kita simpan,”   “(Ucapan kasar) bisa jadi contoh buruk untuk generasi ke depan. Apalagi di Jakarta kan jadi barometer. Pemimpin tentu tidak boleh sampai seperti itu,”</p> <p>6) Penutup: “(Ucapan kasar) bisa jadi contoh buruk untuk generasi ke depan. Apalagi di Jakarta kan jadi barometer. Pemimpin tentu tidak boleh sampai seperti itu,” <u>pungkasnya.</u></p>
Skrip	7) <i>What</i> : Tim angket yang akan memperlakukan ucapan

	<p>Ahok yang dinilai kasar</p> <p>8) <i>Who</i> : Ongen Sangaji</p> <p>9) <i>Why</i> : Karena sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kepanitiaan angket, yakni melakukan investigasi terhadap pelanggaran etika yang dilakukan Ahok sebagai seorang pemimpin</p> <p>10) <i>Where</i> : Gedung DPRD DKI Jakarta, Jln. Kebon Sirih, Jakarta Pusat</p> <p>11) <i>When</i> : 24 Maret 2015</p> <p>12) <i>How</i> : Adapun alasan pihaknya mempersoalkan ucapan kasar Ahok sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kepanitiaan angket, yakni melakukan investigasi terhadap pelanggaran etika yang dilakukan Ahok sebagai seorang pemimpin. Menurut Ongen apapun alasannya, sebagai orang nomor satu di DKI tidak sepatutnya bicara kasar, termasuk menggunakan ‘bahasa toilet’ sekalipun</p>
Tematik	13) Alasan tim angket permasalahan ucapan Ahok yang dinilai kasar
Retoris	<p>14) Penggunaan kata: “bahasa toilet”</p> <p>15) Grafis: Penggunaan tanda kutip, tanda dalam kurung, dan foto narasumber</p>

### C. Analisis Objek Penelitian Kompas.com

#### 1. Analisis Berita “DPRD DKI Kurang Perhitungan Lakukan Hak Angket”

Berita yang akan dianalisis ini berisi pendapat dari pengamat terkait kelanjutan dari peristiwa hak angket dimana adanya perintah dari DPP partai masing-masing yang menyuruh fraksi menarik dukungan terhadap hak angket sehingga bisa dikatakan berita ini masuk kedalam jenis berita *indepth news*. Berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan.

Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Kompas.com terhadap hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis struktur **sintaksis**, **Headline** yang digunakan Kompas.com adalah “DPRD DKI Kurang Perhitungan Lakukan Hak Angket”. Dari judul terlihat jelas pandangan Kompas.com kepada keputusan dikeluarkannya hak angket. Judul ini secara langsung memberi citra yang negatif kepada DPRD DKI Jakarta yang dinilai kurang perhitungan lakukan hak angket.

**Lead** yang digunakan sudah baik karena sudah dapat memberikan sudut pandang dari berita namun *lead* ini terkesan menjatuhkan DPRD DKI. Kompas.com menyatakan bahwa adanya perintah untuk menarik dukungan terhadap hak angket dari DPP partai masing-masing fraksi adalah bentuk dari kurangnya perhitungan yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI dalam mengeluarkan hak angket terhadap Ahok. Berikut *lead* yang dicantumkan pada teks berita ini:

Anggota DPRD DKI dinilai kurang melakukan kalkulasi politik ketika memutuskan untuk mengajukan hak angket. Hal ini terbukti dengan adanya perintah dari DPP partai masing-masing fraksi yang menyuruh fraksi menarik dukungan terhadap hak angket.

Selanjutnya **latar informasi** yang digunakan adalah adanya beberapa fraksi yang diperintahkan untuk menarik dukungan terhadap hak angket dan salah satu yang sudah pasti menarik diri adalah partai NasDem. Berikut latar informasi yang dimuat pada teks berita:

Sebagai informasi, beberapa fraksi memang telah diperintahkan untuk mencabut dukungan hak angket. Satu fraksi yang telah pasti mencabut



dukungan ialah Fraksi NasDem. Sementara beberapa fraksi partai lain disebut masih melakukan pembahasan untuk menentukan sikap partai.

Dari latar informasi diatas terlihat Kompas.com memberi sudut pandang kepada pembaca bahwa fraksi yang sudah pasti mencabut dukungan hak angket adalah fraksi NasDem dan pencabutan dukungan oleh NasDem adalah bentuk nyata dari kurangnya perhitungan yang dilakukan DPRD DKI dalam memutuskan hak angket.

**Kutipan sumber** dalam berita ini adalah pengamat politik Emrus Sihombing. Berikut **pernyataan** Emrus Sihombing yang dicantumkan oleh Kompas.com dalam teks berita ini:

“Itulah pertanda politisi di DPRD DKI yang tidak melakukan kalkulasi politik terhadap dinamika politik di internal partainya sendiri secara matang ketika mengajukan hak angket,”

“Ini adalah kesempatan bagi Ahok untuk terus maju membongkar mafia anggaran di DPRD”

Dari kutipan pernyataan diatas memberikan citra negatif kepada DPRD DKI. Keputusan hak angket yang sebelumnya disepakati bersama oleh anggota DPRD tidak diperhitungkan dan dikalkulasikan di *internal* partai sehingga adanya perintah penarikan diri dari fraksi partai di DPRD. Pernyataan tersebut juga menempatkan Ahok sebagai pihak yang tidak bersalah dalam RAPBD sehingga hak angket itu nantinya akan membongkar mafia anggaran di DPRD.

**Penutup** dalam berita ini adalah pernyataan dari Kompas.com yang mengambil pernyataan dari wakil ketua DPRD DKI Muhammad Taufik. Berikut penutup dalam teks berita ini:

Akan tetapi, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan, belum ada anggota Dewan yang mencabut dukungannya atas hak angket. Dia menjelaskan, pencabutan dukungan ini bersifat personal. Pencabutan dukungan hanya dapat dilakukan oleh individu anggota Dewan sendiri. Anggota Dewan tetap dikatakan mendukung hak angket jika tidak mencabut sendiri. Meskipun fraksi dan partai sudah memerintahkan untuk menarik dukungan.

Terlihat dari penutup tersebut Kompas.com hanya bersifat menginformasikan kepada pembaca bahwa saat ini belum ada pencabutan dukungan dari anggota DPRD DKI terhadap hak angket walaupun sudah ada perintah dari fraksi dan partai. Kompas.com tidak mencantumkan pernyataan dari Muhammad Taufik sebagai “kutipan” dalam teks beritanya. Skema semacam ini agar lebih menekankan kepada pembaca bahwa pendapat Emrus Sihombing lebih benar dan dapat memperkuat *framing* dari Kompas.com

Berdasarkan analisis pada struktur **skrip**, berita ini mengisahkan tentang DPRD DKI Jakarta yang kurang perhitungan lakukan hak angket (*what*). Unsur *Who* dalam berita adalah DPRD DKI. Adanya perintah menarik dukungan terhadap hak angket dari DPP partai masing-masing fraksi adalah bukti hak angket kurang perhitungan (*why*). Dalam berita tidak terdapat unsur *where*, namun unsur *when* adalah Kamis 5 Maret 2015. Unsur bagaimana (*how*) dapat dilihat pada paragraf ketujuh dalam berita yang menjelaskan bagaimana bentuk kurangnya perhitungan hak angket yang dilakukan DPRD yang dapat dilihat dari tindakan penarikan diri oleh Fraksi NasDem dan fraksi lain yang masih membahas untuk menentukan sikap partai terhadap hak angket.

Berdasarkan analisis **tematik**, Kompas.com dalam berita ini mengangkat dua tema yang ingin disampaikan. Yang *pertama* hak angket tidak melalui perhitungan yang matang oleh anggota DPRD. Kurangnya perhitungan tersebut diperlihatkan dengan adanya perintah dari beberapa fraksi untuk menarik dukungan terhadap hak angket. Hal ini dapat dilihat pada paragraf ketujuh sebagai perangkat **detail** dalam teks berita yang menyatakan sudah ada fraksi yang menarik dukungan dan sebagian fraksi masih melakukan pembahasan untuk menentukan sikap partai terhadap dukungan hak angket.

Tema yang *kedua* adalah alasan penarikan dukungan terhadap hak angket. Kompas.com memperlihatkan alasan penarikan dukungan tersebut pada perangkat framing koherensi. Ditemukan **koherensi sebab akibat** pada kalimat “Jika ini terbongkar, kata Emrus, terbuka jugalah “permainan” semuanya **sehingga** wajar apabila ada partai yang menarik dukungan atas hak angket”. Permainan yang dimaksud adalah anggota partai pusat masih bermain-main anggaran dengan anggota partainya yang menjadi anggota legislatif di daerah. Langkah Ahok yang melaporkan anggota dewan ke KPK telah membuat anggota DPP semua partai merasa takut karena langkah tersebut dinilai akan membuka permainan anggaran yang terjadi dalam tubuh legislatif sehingga wajar apabila ada partai yang menarik dukungan atas hak angket. Dengan begitu Kompas.com memperlihatkan alasan adanya perintah penarikan dukungan terhadap hak angket adalah hal yang negatif dan menjatuhkan anggota DPRD.

Struktur terakhir yang dianalisis pada berita ini adalah struktur **retoris**. Berdasarkan analisis, Kompas.com menekankan fakta dengan menggunakan

klaim otoritas dari pakar. Emrus Sihobing yang dilekati dengan kata “pengamat politik” yang mengkomunikasikan bahwa apa yang diberitakan oleh Kompas.com adalah benar adanya dan mempunyai bobot keilmuan karena sebagai pakar pengamat politik.

Selain itu terdapat perangkat *framing grafis* pada kata “permainan” yang diberi tanda kutip untuk memberikan penekanan pada aspek pandangan Kompas.com yang berpandangan anggota partai dipusat masih bermain-main anggaran dengan anggota partainya yang menjadi anggota legislatif di daerah. Perangkat *framing grafis* juga dapat dilihat pada foto yang digunakan dalam berita. Berikut foto yang dimuat:

Gambar 3.7

Foto pada berita “DPRD DKI Kurang Perhitungan Lakukan Hak Angket”



Pada foto diatas Kompas.com memberi keterangan “Suasana paripurna pengajuan angket DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/2/2015)”. Dari foto tersebut

terlihat anggota DPRD yang serius menjalani rapat paripurna. Melalui foto ini Kompas.com ingin memperlihatkan bahwa rapat yang berlangsung serius tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi selanjutnya dengan adanya perintah penarikan diri terhadap hak angket.

Setelah dianalisis, pada berita ini Kompas.com memberikan pandangan mereka terhadap hak angket. Pandangan tersebut dikonstruksi dalam bentuk berita yang mengkritisi langkah DPRD DKI mengeluarkan hak angket yang dianggap kurang perhitungan. Kompas.com dalam merekonstruksi berita ini yang pertama, kurangnya perhitungan anggota DPRD bisa dilihat pada adanya perintah dari DPP partai masing-masing fraksi yang menyuruh fraksi menarik dukungan terhadap hak angket. Konstruksi yang kedua, Kompas.com juga melihat alasan penarikan tersebut karena partai ketakutan atas tindakan AHOK yang melaporkan anggota dewan ke KPK. Konstruksi yang ketiga, Kompas.com melihat bentuk ketakutan tersebut dikarenakan anggota partai dipusat masih bermain-main anggaran dengan anggota partainya yang menjadi anggota legislatif di daerah sehingga langkah Ahok yang melaporkan anggota Dewan ke KPK ditakutkan akan membuka permainan anggaran yang terjadi dalam tubuh legislatif. Dengan begitu bisa dilihat bahwa *frame* yang dibuat Kompas.com adalah hak angket terhadap Ahok kurang diperhitungkan anggota DPRD dengan internal partai.

**Frame: Hak angket terhadap Ahok kurang diperhitungkan anggota DPRD dengan internal partai**

Tabel 3.8

Sajian Analisis Berita “DPRD DKI Kurang Perhitungan Lakukan Hak Angket”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<p>1) <i>Headline</i>: DPRD DKI Kurang Perhitungan Lakukan Hak Angket</p> <p>2) <i>Lead</i>: Anggota DPRD DKI dinilai kurang melakukan kalkulasi politik ketika memutuskan untuk mengajukan hak angket. Hal ini terbukti dengan adanya perintah dari DPP partai masing-masing fraksi yang menyuruh fraksi menarik dukungan terhadap hak angket.</p> <p>3) Latar Informasi: Sebagai informasi, beberapa fraksi memang telah diperintahkan untuk mencabut dukungan hak angket. Satu fraksi yang telah pasti mencabut dukungan ialah Fraksi NasDem. Sementara beberapa fraksi partai lain disebut masih melakukan pembahasan untuk menentukan sikap partai.</p> <p>4) Sumber: Pengamat politik Emrus Sihombing</p> <p>5) Pernyataan:            “Itulah pertanda politisi di DPRD DKI yang tidak melakukan kalkulasi politik terhadap dinamika politik di internal partainya sendiri secara matang ketika mengajukan hak angket,”             “Ini adalah kesempatan bagi Ahok untuk terus maju membongkar mafia anggaran di DPRD”</p> <p>6) Penutup: Akan tetapi, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan, belum ada anggota Dewan yang mencabut dukungannya atas hak angket. Dia menjelaskan, pencabutan dukungan ini bersifat personal. Pencabutan dukungan hanya dapat dilakukan oleh individu anggota Dewan sendiri. Anggota Dewan tetap dikatakan mendukung hak angket jika tidak mencabut sendiri. Meskipun fraksi dan partai sudah memerintahkan untuk menarik dukungan.</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : DPRD DKI Jakarta yang kurang perhitungan lakukan hak angket</p> <p>8) <i>Who</i> : DPRD DKI Jakarta</p> <p>9) <i>Why</i> : Adanya perintah menarik dukungan terhadap hak</p>

	<p>angket dari DPP partai masing-masing fraksi</p> <p>10) <i>Where</i> : -</p> <p>11) <i>When</i> : Kamis (5/3/2015)</p> <p>12) <i>How</i> : Sebagai informasi, beberapa fraksi memang telah diperintahkan untuk mencabut dukungan hak angket. Satu fraksi yang telah pasti mencabut dukungan ialah Fraksi NasDem. Sementara beberapa fraksi partai lain disebut masih melakukan pembahasan untuk menentukan sikap partai.</p>
Tematik	<p>13) Hak angket tidak melalui perhitungan yang matang oleh anggota DPRD</p> <p>14) Alasan penarikan dukungan terhadap hak angket</p>
Retoris	<p>15) Penggunaan kata : “pengamat politik”</p> <p>16) Grafis: Penggunaan tanda kutip dan foto narasumber</p>

## 2. Analisis Berita “Hak Angket, Ahok, dan Akrobat Politik DPRD DKI”

Berita yang akan dianalisis ini berisi pendapat dari pengamat terkait keputusan dikeluarkannya hak angket. Bisa dikatakan berita ini masuk kedalam jenis berita *indepth news* dikarenakan masih terkait mata rantai peristiwa hak angket yang dikaji secara mendalam dengan pendapat dari pengamat. Berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Kompas.com terhadap hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis struktur **sintaksis**, **headline** yang digunakan adalah “Hak Angket, Ahok, dan Akrobat Politik DPRD DKI”. Dari judul kita sudah bisa melihat pandangan Kompas.com terhadap hak angket. Kompas.com melalui judulnya memperlihatkan bahwa hak angket yang dilakukan hanya merupakan

akrobat politik yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Dengan kata lain hak angket tidak dilakukan untuk kepentingan rakyat namun hanya sebagai permainan politik anggota DPRD DKI. Disini Kompas.com memberikan citra yang negatif terhadap DPRD DKI.

Selanjutnya berita ini disambung dengan *lead* sebagai berikut:

Selama sebulan terakhir, jagad politik DKI Jakarta diwarnai dengan wacana pengguliran hak angket bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tim angket yang beranggotakan 32 anggota DPRD pun telah mulai bekerja untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang dan etika oleh Ahok.

Dari *lead* diatas terlihat Kompas.com tidak secara langsung memberi citra yang negatif terhadap DPRD, melainkan memberi gambaran secara jelas langkah tim angket yang sudah mulai bekerja menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang dan etika oleh Ahok sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal dikeluarkannya hak angket.

Pada berita ini Kompas.com menggunakan **latar informasi** tentang tujuan pembentukan panitia tim angket yang dikatakan oleh pengamat kebijakan publik hanyalah akrobat politik para politisi dan hanya untuk popularitas. Latar tersebut tercermin dalam kalimat:

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, tujuan pembentukan panitia hak angket hanyalah akrobat politik para politisi. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi popularitas. Agus tak yakin DPRD akan menindaklanjuti dengan serius jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok. Ingar bingar ini diprediksi akan berakhir antiklimaks.



Latar informasi seperti ini memberi sudut pandang kepada pembaca bahwa dari segi kebijakan publik hak angket hanyalah akrobat politik dan hanya untuk popularitas semata. Hak angket tidak mementingkan kepentingan publik dalam hal pengambilan kebijakan. Pada kenyataannya anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus mengambil kebijakan yang memang lebih mementingkan publik, bukan mementingkan individu anggota DPRD sehingga tidak heran apabila hak angket diprediksi akan berakhir antiklimaks.

**Kutipan sumber** dalam berita ini adalah pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Melalui Agus Pambagio, Kompas.com menekankan kepada pembaca bahwa dari segi kebijakan publik hak angket adalah kebijakan yang tidak terlalu mementingkan publik. Hal ini juga berarti mengklaim validitas dan kebenaran dari *frame* yang dibuat oleh Kompas.com. Berikut **pernyataan** dari Agus Pambagio dalam teks berita ini:

“Ini hanya sekedar akrobat politik dari para badut-badut. Sekarang satu per satu udah pada nyabut, bentar lagi juga bubar, “

“Ahok juga menikmati euforia ini. Kan dia bisa marah-marah, terutama marahin anggota DPRD,”

“Haji Lulung makin terkenal, padahal air di rumah kita enggak jalan,”

“Jadi, sudah lah. Akhiri saja yang kayak begini-begini. Masyarakat udah males,”

“Mendagri sahkan aja, terserah mau yang versi mana. Jangan malah jadi mencla-mencle,”

Dari pernyataan diatas memberikan kesan yang negatif terhadap DPRD dan memberi kesan positif terhadap Ahok. DPRD dinyatakan sebagai badut dan Ahok menikmati permainan akrobat politik dari para badut-badut DPRD.

Kompas.com melalui pernyataan ketiga menekankan bahwa memang kebijakan ini tidak mementingkan publik karena hanya membuat Lulung terkenal dan kepentingan publik terbengkalai. Hal ini sesuai dengan kapasitas narasumber sebagai pengamat kebijakan publik yang dianggap kompeten oleh Kompas.com untuk memperkuat *framingnya*. Melalui pernyataan keempat dari narasumber, Kompas.com secara tidak langsung menginginkan agar hak angket dibatalkan saja.

Pernyataan terakhir dijadikan **penutup** oleh Kompas.com. Dengan begitu Kompas.com menghimbau agar Mendagri mensahkan RAPBD tanpa harus melihat yang mana yang benar agar hak angket ini dengan sendirinya bisa dibatalkan.

Berdasarkan analisis struktur **skrip**, berita ini mengisahkan hak angket hanya merupakan akrobat politik para anggota DPRD DKI Jakarta (*what*). Hal ini dikemukakan oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio (*who*) pada hari Rabu, 11 Maret 2015 (*when*). Dalam berita dijelaskan bahwa tujuan pembentukan panitia angket untuk popularitas dan tidak menguntungkan masyarakat (*why*) sehingga kesannya hanya akrobat politik. Unsur *how* pada berita ini bisa dilihat pada pernyataan-pernyataan narasumber yang menjelaskan bagaimana hak angket bisa dikatakan sebagai akrobat politik. Tidak terdapat unsur *where* pada berita ini.

Berdasarkan analisis struktur **tematik**, ada dua tema yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang pertama hak angket hanyalah suatu permainan akrobat politik anggota DPRD untuk popularitas mereka, dan yang

kedua hak angket merugikan masyarakat namun menguntungkan bagi Ahok. Hal ini bisa dilihat dengan penggunaan koherensi dan kata ganti sebagai perangkat framing untuk membawa tema yang ditampilkan.

Terdapat **koherensi penjelas** pada kalimat “Kesempatan ini, kata Agus, dimanfaatkan Ahok untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang tegas **dan** tak kenal kompromi. Penggunaan koherensi dengan kata hubung “dan” berusaha memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan citra yang positif kepada Ahok. Selain itu terdapat **koherensi sebab akibat** pada kalimat “Menurut Agus, persoalan ini justru merugikan masyarakat **karena** mengakibatkan pengesahan RAPBD menjadi APBD terbengkalai. Koherensi ini memperlihatkan bahwa hak angket yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah sesuatu yang salah dan tidak menguntungkan masyarakat karena menyebabkan RAPBD menjadi APBD terbengkalai. Dengan begitu Kompas.com memberikan citra yang negatif kepada DPRD.

Pemberian citra negatif terhadap DPRD juga bisa dilihat pada **kata ganti** yang digunakan. Terdapat kata “**badut-badut**” yang digunakan untuk menyebut anggota DPRD. Kata tersebut menimbulkan kesan bahwa anggota DPRD adalah orang-orang yang lucu dan hanya menghibur. Seakan langkah DPRD mengeluarkan hak angket hanyalah suatu permainan yang dimainkan oleh anggota DPRD untuk menghibur masyarakat.

Kompas.com juga menampilkan fakta kepada pembaca dengan penekanan-penekanan tertentu pada level retorik. Berdasarkan analisis pada

struktur **retoris**, Kompas.com banyak menggunakan perangkat framing grafis yang dicetak miring sebagai bentuk penekanan untuk dilihat sebagai hal yang berbeda dan perlu mendapatkan perhatian khusus kepada pembaca. Kata yang dicetak miring tersebut antara lain “nyabut”, “udah males”, dan “mencla-mencla”. Bila dilihat secara keseluruhan kalimat yang didalamnya terdapat elemen grafis tersebut, kata “nyabut” disini memperlihatkan bahwa saat ini anggota DPRD sudah ada yang mencabut dukungan terhadap hak angket, kata “udah males” memperlihatkan keadaan masyarakat yang malas menanggapi hak angket, dan kata “mencla-mencla” memperlihatkan harapan dari narasumber agar masalah ini tidak melebar kemana-mana. Semua kata yang diberi grafis tersebut menekankan kepada pembaca makna yang ingin ditampilkan Kompas.com sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu grafis yang digunakan dalam bentuk foto. Berikut foto yang digunakan:

Gambar 3.8

Foto pada berita “Hak Angket, Ahok, dan Akrobat Politik DPRD DKI”



Foto diatas diberikan keterangan “Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (tengah) didampingi empat wakilnya, masing-masing (dari kiri) Abraham Lunggana, Mohamad Taufik, Triwisaksana, dan Ferial Sofyan, usai rapat paripurna pengajuan hak angket ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/2/2015). Foto tersebut diperlihatkan Kompas.com untuk menenkankan bahwa hak angket tidak dianggap serius dengan ekspresi para pimpinan DPRD dalam foto yang tersenyum dan berpegangan tangan seolah-olah sedang bermain-main.

Setelah dianalisis, pada berita ini Kompas.com memberikan pandangan mereka terhadap hak angket. Berita ini dikonstruksi secara negatif dalam bentuk mengkritisi hak angket dengan pernyataan dari pengamat kebijakan publik yang menyatakan hak angket hanyalah akrobat politik para politisi yang tujuannya demi popularitas. Selain itu pernyataan dari narasumber memperlihatkan bahwa hak angket tidak menguntungkan bagi masyarakat. Sehingga bisa dilihat *Frame* yang dibuat pada berita ini adalah “hak angket hanyalah akrobat politik anggota DPRD dan merugikan rakyat”. Dengan begitu bisa dikatakan Kompas.com memberi citra yang negatif kepada DPRD karena keputusannya mengeluarkan hak angket dipandang Kompas.com hanya sebagai akrobat politik dan merugikan rakyat.

**Frame: Hak angket hanyalah akrobat politik anggota DPRD dan merugikan rakyat**

Tabel 3.9

Sajian Analisis Berita “Hak Angket, Ahok, dan Akrobat Politik”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<p>1) <i>Headline</i>: Hak Angket, Ahok, da Akrobat Politik DPRD DKI</p> <p>2) <i>Lead</i>: Selama sebulan terakhir, jagad politik DKI Jakarta diwarnai dengan wacana pengguliran hak angket bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tim angket yang beranggotakan 32 anggota DPRD pun telah mulai bekerja untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang dan etika oleh Ahok.</p> <p>3) Latar Informasi: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, tujuan pembentukan panitia hak angket hanyalah akrobat politik para politisi. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi popularitas. Agus tak yakin DPRD akan menindaklanjuti dengan serius jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok. Ingar bingar ini diprediksi akan berakhir antiklimaks.</p> <p>4) Sumber: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio</p> <p>5) Pernyataan:</p> <p>“Ini hanya sekedar akrobat politik dari para badut-badut. Sekarang satu per satu udah pada <i>nyabut</i>, bentar lagi juga bubar,”</p> <p>“Ahok juga menikmati euforia ini. Kan dia bisa marah-marah, terutama marahin anggota DPRD,”</p> <p>“Haji Lulung makin terkenal, padahal air di rumah kita enggak jalan,”</p> <p>“Jadi, sudah lah. Akhiri saja yang kayak begini-begini. Masyarakat <i>udah males</i>,”</p> <p>“Mendagri sahkan aja, terserah mau yang versi mana. Jangan malah jadi <i>mencla-mencla</i>,”</p> <p>6) Penutup: “Mendagri sahkan aja, terserah mau yang versi</p>

	mana. Jangan malah jadi mencla-mencle,”
Skrip	7) <i>What</i> : Hak angket hanya merupakan akrobat politik para anggota DPRD DKI Jakarta 8) <i>Who</i> : Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio 9) <i>Why</i> : Karena tujuan pembentukan panitia angket untuk popularitas dan tidak menguntungkan masyarakat 10) <i>Where</i> : - 11) <i>When</i> : Rabu, 11 Maret 2015 12) <i>How</i> : Pernyataan-pernyataan narasumber yang menjelaskan bagaimana hak angket bisa dikatakan sebagai akrobat politik
Tematik	13) Hak angket hanyalah suatu permainan akrobat politik anggota DPRD untuk popularitas mereka 14) Hak angket merugikan masyarakat namun menguntungkan bagi Ahok
Retoris	15) Grafis: Penggunaan huruf miring dan foto

### 3. Analisis Berita “Panggil Istri Ahok, Panitia Angket DPRD DKI Dipertanyakan Logika Hukumnya”

Berita ini masuk dalam jenis berita *indepht news* yang mengkaji secara mendalam dari sudut pandang pakar terkait proses berjalannya hak angket dimana tim angket berencana memanggil istri Ahok. Bila dilihat dari nilai berita, berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Kompas.com terhadap proses berjalannya penyelidikan hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis struktur **sintaksis**, Kompas.com menggunakan **headline** “Panggil Istri Ahok, Panitia Angket DRDD DKI Dipertanyakan Logika

Hukumnya”. Dari judul tersebut sudah dapat dilihat pandangan Kompas.com yang mempertanyakan logika hukum dari panitia angket yang akan memanggil istri Ahok. Pandangan Kompas.com dalam menyikapi hal ini adalah langkah DPRD DKI yang memanggil Veronica Tan dianggap salah dari segi hukum. Penekanan dalam hal ini dapat dilihat juga pada *Lead* yang digunakan Kompas.com. Berikut *lead* yang digunakan dalam isi beritanya:

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, tak habis pikir dengan tindakan tim hak angket DPRD Jakarta terhadap istri Gubernur DKI Jakarta, Veronica Tan. Sebab, menurut dia, pemanggilan tersebut tak berdasar.

Dari *lead* tersebut Kompas.com memberikan pernyataan yang langsung menyebut pakar hukum tata negara untuk menekankan pemanggilan istri Ahok salah dari segi hukum dan tidak mempunyai dasar hukum. *Lead* ini sudah dapat memberikan sudut pandang dari berita. Untuk lebih meyakinkan pembaca, Kompas.com menggunakan **latar informasi** sebagai berikut dalam teks beritanya:

Menurut Margarito, tim hak angket tidak memiliki landasan hukum memanggil istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu, kecuali, kata dia, tim hak angket DPRD Jakarta mempersoalkan pengelolaan perusahaan milik daerah atau BUMD.

Latar informasi diatas membawa pandangan khalayak bahwa tim angket tidak mempunyai landasan hukum memanggil istri Ahok dalam penyelidikan hak angket karena hak angket yang berjalan saat ini mempersoalkan RAPBD dan etika Ahok. Tim angket dapat memanggil istri Ahok kecuali dalam hak angket persoalan yang diangkat adalah menyangkut pengelolaan perusahaan milik daerah atau BUMD.



**Kutipan sumber** dalam berita ini adalah pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Dengan begitu Kompas.com secara umum ingin menekankan kepada pembaca bahwa pandangan Kompas.com hal tersebut adalah benar karena didukung oleh pernyataan narasumber yang kompeten dibidangnya. Adapun **pernyataan** yang dicantumkan dalam berita ini adalah sebagai berikut:

“Sulit dapat logika hukumnya. Fokus hak angket itu kan APBD. Kenapa tiba-tiba CSR? Itu tidak ada kaitannya dengan hak angket DPRD DKI Jakarta,”

“Jadi, kalau fokus penyelidikan tim angket ke pengelolaan uang daerah, bisa. Tapi, tim angket yang sekarang tidak. Tidak ada kaitannya istri Ahok dengan penyusunan APBD. Kalau CSR itu kan realisasi keuangan daerah, ini pembahasan angket DPR baru tahap desain anggaran soal belanja dan biaya, bukan realisasi,”

“Istri Ahok tolak saja pemanggilan itu. Beri keterangan hukum yang logis. Soalnya tidak ada kaitannya dengan dirinya,”

Pernyataan-pernyataan diatas mempertegas kembali bahwa pemanggilan istri Ahok dari segi hukum adalah salah dan memberikan penjelasan secara rinci kenapa hal tersebut diluar logika hukum dan tidak ada kaitannya dengan hak angket. Pernyataan ketiga dijadikan **penutup** oleh Kompas.com. Melalui pernyataan ketiga Kompas.com menginginkan istri Ahok menolak panggilan tersebut dan apabila DPRD tetap ingin melakukannya setidaknya DPRD bisa memberikan keterangan yang jelas alasan pemanggilannya dari segi hukum.

Berdasarkan analisis pada struktur **skrip**, berita ini mengisahkan panitia angket yang dipertanyakan logika hukumnya karena akan memanggil istri Ahok pada proses penyelidikan hak angket Ahok (*what*). Langkah tersebut tidak memiliki landasan hukum kecuali tim angket mempersoalkan pengelolaan

perusahaan milik daerah atau BUMD (*why*). Unsur *who* dalam berita ini adalah panitia angket. Unsur *when* adalah waktu narasumber memberikan pernyataan pada hari Jumat 13 Maret 2015 dan unsur *where* adalah keterangan tempat narasumber dalam memberikan pernyataan di Jakarta. Sedangkan unsur *how* dalam berita adalah pernyataan narasumber pada paragraf keempat berita yang menjelaskan bagaimana pemanggilan istri Ahok itu diluar dari tujuan hak angket karena bukan fokus pada penyusunan APBD dan tidak ada kaitannya dengan istri Ahok pada penyusunan APBD.

Berdasarkan analisis pada struktur **tematik**, tema yang ingin disampaikan Kompas.com yaitu panitia angket tidak mempunyai landasan hukum memanggil istri Ahok dalam proses penyelidikan hak angket. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Tema ini disusun dalam teks dengan memberikan **detail** pada teks. Dalam teks diuraikan penjelasan Margarito Kamis sebagai alasan pemanggilan tersebut tidak mempunyai landasan hukum. Selain itu terdapat **koherensi sebab akibat** pada paragraf pertama teks berita. Koherensi tersebut ditandai dengan kata “sebab” yang memperlihatkan pandangan narasumber yang tak habis pikir terhadap tindakan tim angket yang akan memanggil istri Ahok sebab hal tersebut tidak berdasar. Koherensi sebab akibat juga terdapat pada kalimat “**Karena** itu, ujar dia, istri Ahok berhak menolak datang. Koherensi tersebut memperlihatkan bahwa tindakan tim angket adalah salah karena istri Ahok mempunyai hak untuk menolak datang.

Berdasarkan analisis struktur **retoris**, Kompas.com untuk menekankan pandangan mereka fakta adalah dengan menggunakan klaim otoritas keilmuan.

Klaim tersebut diperlihatkan dengan memberikan label otoritas keilmuan dan kepakaran tertentu pada sumber. Margarito Kamis dilekati dengan kata “Pakar Hukum Tata Negara” yang menekankan pandangan Kompas.com mempunyai bobot keilmuan. Selain itu terdapat kata “tak habis pikir” untuk memperlihatkan pandangan narasumber terhadap langkah panitia angket yang memanggil istri Ahok. Arti kata tak habis pikir adalah tidak dapat mengerti mengapa suatu hal sampai terjadi (<http://kbbi.web.id/pikir>, diakses tanggal 3 November 2015 pukul 23.12 WIB). Dengan begitu Kompas.com menekankan pemanggilan tersebut tidak berdasar.

Dalam berita terdapat grafis berupa foto. Berikut foto yang dicantumkan:

Gambar 3.9

Foto pada berita “Panggil Istri Ahok, Panitia Angket DPRD DKI Dipertanyakan Logika Hukumnya”



Foto diatas diberi keterangan “Rapat hak angket yang digelar di Gedung DPRD DKI, Jumat (13/3/2015). Rapat digelar dalam rangka mendengarkan keterangan Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata Sylviana Murni, terkait

kapasitas Veronica Tan dan Harry Basuki dalam sebuah rapat di Balai Kota DKI Jakarta”. Foto tersebut digunakan untuk menekankan fakta bahwa tim angket memang akan memanggil istri Ahok karena tim angket sudah menanyakan kapasitas Veronica Tan dalam rapat di Balai Kota DKI Jakarta dari Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata Sylviana Murni.

Setelah dianalisis, pada berita ini Kompas.com memberikan pandangan mereka terhadap proses penyelidikan hak angket terhadap Ahok yang rencananya tim angket akan memanggil Istri Ahok untuk dimintai keterangan. Kompas.com merekonstruksi hal tersebut salah dari segi hukum dengan pernyataan dari pakar hukum tata negara. Kompas.com melihat panitia angket perlu dipertanyakan logika hukumnya karena pemanggilan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat. Dengan begitu Kompas.com tidak setuju terhadap pemanggilan tersebut. Sehingga *Frame* yang dibuat oleh Kompas.com pada berita ini adalah “pemanggilan istri Ahok tidak mempunyai landasan hukum.

***Frame: Pemanggilan istri Ahok tidak mempunyai landasan hukum***

Tabel 3.10

Sajian Analisis Berita “Panggil Istri Ahok, Panitia Angket DPRD DKI Dipertanyakan Logika Hukumnya”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	1) <i>Headline</i> : Panggil Istri Ahok, Panitia Angket DPRD DKI Dipertanyakan Logika Hukumnya 2) <i>Lead</i> : Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, tak habis pikir dengan tindakan tim hak angket DPRD Jakarta terhadap istri Gubernur DKI Jakarta, Veronica Tan. Sebab, menurut dia, pemanggilan tersebut tak berdasar. 3) <i>Latar Informasi</i> : Menurut Margarito, tim hak angket tidak

	<p>memiliki landasan hukum memanggil istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu, kecuali, kata dia, tim hak angket DPRD Jakarta mempersoalkan pengelolaan perusahaan milik daerah atau BUMD.</p> <p>4) Sumber: Pakar hukum tata negara Margarito Kamis</p> <p>5) Pernyataan:</p> <p>“Sulit dapat logika hukumnya. Fokus hak angket itu kan APBD. Kenapa tiba-tiba CSR? Itu tidak ada kaitannya dengan hak angket DPRD DKI Jakarta,”</p> <p>“Jadi, kalau fokus penyelidikan tim angket ke pengelolaan uang daerah, bisa. Tapi, tim angket yang sekarang tidak. Tidak ada kaitannya istri Ahok dengan penyusunan APBD. Kalau CSR itu kan realisasi keuangan daerah, ini pembahasan angket DPR baru tahap desain anggaran soal belanja dan biaya, bukan realisasi,”</p> <p>“Istri Ahok tolak saja pemanggilan itu. Beri keterangan hukum yang logis. Soalnya tidak ada kaitannya dengan dirinya,”</p> <p>6) Penutup: “Mendagri sahkan aja, terserah mau yang versi mana. Jangan malah jadi mencla-mencle,”</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : Panitia angket yang dipertanyakan logika hukumnya karena akan memanggil istri Ahok pada proses penyelidikan hak angket Ahok</p> <p>8) <i>Who</i> : Panitia Angket</p> <p>9) <i>Why</i> : Langkah tersebut tidak memiliki landasan hukum kecuali tim angket mempersoalkan pengelolaan perusahaan milik daerah atau BUMD</p> <p>10) <i>Where</i> : Jakarta</p> <p>11) <i>When</i> : Jumat (13/3/2015)</p> <p>12) <i>How</i> : “Jadi, kalau fokus penyelidikan tim angket ke pengelolaan uang daerah, bisa. Tapi, tim angket yang sekarang tidak. Tidak ada kaitannya istri Ahok dengan penyusunan APBD. Kalau CSR itu kan realisasi keuangan daerah, ini pembahasan angket DPR baru tahap desain anggaran soal belanja dan biaya, bukan realisasi,” ujarnya</p>
Tematik	13) Panitia angket tidak mempunyai landasan hukum memanggil istri Ahok dalam proses penyelidikan hak angket
Retoris	14) Penggunaan kata “pakar hukum tata negara”, “tak habis pikir”

#### 4. Analisis Berita “DPRD DKI yang Kurang Koordinasi”

Berita ini adalah pengembangan dari peristiwa hak angket yang berisi fakta-fakta yang diuraikan dan dikaitkan dengan proses-proses penyelidikan hak angket dari pendapat tim angket DPRD DKI. Dengan kata lain berita ini adalah jenis berita *indepth news*. Bila dilihat dari nilai berita, berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Kompas.com terhadap proses berjalannya penyelidikan hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis struktur **sintaksis**, Kompas.com menggunakan **headline** “DPRD DKI yang Kurang Koordinasi”. Judul tersebut secara langsung memberi citra yang negatif terhadap DPRD. Kompas.com melalui judulnya memperlihatkan DPRD DKI yang kurang koordinasi. **Lead** yang digunakan pun terkesan menjatuhkan DPRD DKI. Berikut *lead* dari Kompas.com:

Selama ini, banyak ketidakkompakan yang terjadi dalam internal DPRD DKI. Baik dalam hal-hal kecil seperti jadwal rapat hingga upaya pelaporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dari *lead* tersebut Kompas.com memberikan perspektif bahwa dalam proses hak angket yang berjalan, banyak ketidakkompakan yang terjadi di DPRD DKI baik dari jadwal rapat hingga upaya pelaporan Ahok.

**Latar informasi** yang digunakan adalah sebagai berikut:

Beberapa hal lain yang menunjukkan inkonsistensi anggota Dewan ialah mengenai jadwal pemanggilan ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Pemanggilan terhadap Prasetio sudah dijadwalkan beberapa kali. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pemanggilan Prasetio. Padahal, pemanggilan Prasetio bersinggungan langsung dengan tujuan awal pembentukan tim angket, yaitu untuk menyelidiki keaslian dokumen APBD yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Mendagri.

Latar informasi diatas memberi sudut pandang kepada khalayak tentang kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh DPRD. Pemanggilan Prasetio Edi Marsudi yang belum jelas kapan waktunya dijadikan tolak ukur Kompas.com untuk membawa makna dan kesan ketidakkompakkan yang terjadi di internal DPRD.

**Kutipan sumber** dalam berita ini adalah Anggota dewan dari fraksi PKS yang juga panitia angket Tubagus Arif, Ketua Tim Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji, dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lulung Lungana. Berikut **pernyataan** dari Tubagus Arif yang dimuat dalam teks berita:

“Sekitar jam 10.00 kita rapat angket agendanya memanggil BUMD,”

Pernyataan Tubagus Arif diatas adalah seputar rapat yang agendanya akan memanggil BUMD. Namun selanjutnya Kompas.com memuat pernyataan dari Muhammad Ongen Sangaji selaku ketua tim angket DPRD dimana pernyataannya

berbeda dengan pernyataan Tubagus Arif terkait rapat pemanggilan BUMD.

Berikut pernyataan Ongen Sangaji:

“Belum ada agenda rapat karena panitia mau rapat evaluasi kerja panitia angket selama sepekan bersama panitia angket,”

Terlihat pernyataan Ongen mengatakan belum ada rapat agenda, yang ada hanyalah rapat evaluasi kerja panitia angket yang sudah dilakukan selama seminggu sehingga pernyataan itu menepis pernyataan dari Tubagus Arif. Skema seperti ini digunakan oleh Kompas.com untuk memperlihatkan ketidakkompakan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh tim angket DPRD.

Skema yang sama juga diperlihatkan kembali oleh Kompas.com dengan mencantumkan pernyataan dari Lulung dan Ongen Sangaji yang berbeda satu sama lain. Pernyataan mereka adalah tentang adanya temuan dari tim angket terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Ahok kepada Prasetio (ketua DPRD DKI) sebesar 12,7 triliun sehingga mereka berencana akan melaporkan Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut pernyataan dari Lulung:

“Soal penyuaipan Rp 12,7 triliun, sama aja dengan dengan (anggaran) siluman (yang diributkan Ahok),”

Dalam pandangan Lulung isu tersebut barulah upaya dan belum terjadi sehingga tidak perlu melaporkan Ahok ke KPK. Namun hal tersebut dibantah oleh Ongen Sangaji dengan mengatakan akan tetap melaporkan Ahok ke KPK. Berikut pernyataan Ongen Sangaji yang dimuat Kompas.com dalam beritanya:

“Yang bilang tarik dan tidak kan saya bukan Pak Haji Lulung. Yang ketua hak angket kan saya,”



Pernyataan Ongen Sangaji tersebut memperlihatkan bahwa dirinyalah yang lebih berwenang memutuskan apakah akan melaporkan Ahok ke KPK atau tidak karena posisinya sebagai Ketua tim angket. Kompas.com membandingkan pernyataan tersebut untuk memperlihatkan perbedaan pendapat di *internal* tim angket DPRD. Dengan begitu pernyataan diatas digunakan Kompas.com untuk memperkuat *framing* pemberitaannya terkait proses hak angket dimana tim angket DPRD DKI tidak kompak dalam proses-proses penyelidikan hak angket, dan secara langsung memberi citra yang negatif terhadap DPRD DKI Jakarta.

Sikap Ongen yang tetap akan melaporkan Ahok ke KPK dijadikan **penutup** oleh Kompas.com. Berikut penutup dalam berita ini:

Ongen mengatakan, dugaan suap yang dilakukan Basuki atau Ahok harus tetap dilaporkan. Meskipun baru sekadar upaya penyuaipan saja. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada kelanjutan lagi tentang dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun itu. Saat ditanya, Ongen mengatakan, tim angket masih mencoba menyelesaikan semua hal satu per satu.

Melalui penutup ini Kompas.com menegaskan bahwa segala keputusan oleh tim angket sepenuhnya berada pada Ongen Sangaji walaupun di internal tim angket tidak kompak dengan pendapat yang berbeda-beda.

Berdasarkan analisis pada struktur **skrip**, berita ini mengisahkan ketidakkompakan tim angket DPRD DKI dalam proses penyelidikan hak angket (*what*). Berbedanya pernyataan dari tim angket terkait rapat hak angket yang menjadwalkan memanggil pejabat BUMD, jadwal pemanggilan ketua DPRD DKI, hingga upaya pelaporan Ahok ke KPK adalah bukti ketidakkompakan tim angket (*why*). Unsur *who* dalam berita adalah tim angket DPRD DKI. Tidak

terdapat unsur *where* dalam berita namun unsur *when* diperlihatkan dengan keterangan kapan narasumber memberikan pernyataan kepada Kompas.com, yakni pada Senin 16 Maret 2015 dan Senin 9 Maret 2015. Karena berita ini mengisahkan ketidakkompakan tim angket DPRD maka unsur bagaimana (*how*) ditampilkan Kompas.com dengan menyusun pernyataan-pernyataan yang berbeda dari narasumber dan narasi berita yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan tindakan DPRD terkait beberapa proses penyelidikan hak angket.

Berdasarkan hasil analisis pada struktur tematik, tema yang disampaikan Kompas.com dalam teks berita yaitu ketidakkompakan tim angket DPRD DKI Jakarta pada proses penyelidikan hak angket. Tema tersebut dapat dilihat dari banyaknya penggunaan **koherensi pembeda**. Koherensi pembeda menggunakan kata “**akan tetapi**” digunakan untuk memperlihatkan perbedaan pernyataan dari narasumber terkait proses penyelidikan hak angket. Kalimat yang menggunakan koherensi pembeda tersebut antara lain:

Beberapa hal lain yang menunjukkan inkonsistensi anggota Dewan ialah mengenai jadwal pemanggilan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Pemanggilan terhadap Prasetio sudah dijadwalkan beberapa kali. **Akan tetapi**, sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai pemanggilan Prasetio.

**Akan tetapi**, pihak yang justru telah dipanggil terlebih dahulu ialah deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Moerni.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham “Lulung” Lunggana pernah menggembar-gemborkan bahwa temuan itu akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. **Akan tetapi**, Lulung tiba-tiba menyatakan membatalkan niat pelaporan tersebut.

**Akan tetapi** lagi-lagi hal tersebut dibantah oleh Ketua Tim Hak Angket Muhammad “Ongen” Sangaji. Ongen mengatakan akan tetap melaporkan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun.

Berdasarkan analisis struktur **retoris**, terdapat kata “inkonsistensi” yang digunakan Kompas.com untuk menekankan *frame* mereka pada berita ini. Arti kata Inkonsistensi adalah tidak serasi; tidak sesuai; tidak cocok (<http://kbbi.web.id/inkonsisten> , diakses tanggal 4 November 2015 pukul 16.17 WIB). Dengan begitu kata tersebut digunakan untuk menekankan adanya ketidakkompakan dalam internal tim angket DPRD DKI Jakarta. Selain itu digunakan perangkat *framing* grafis berupa foto. Berikut foto yang dimuat dalam berita:

Gambar 3.10

Foto pada berita “DPRD DKI yang Kurang Koordinasi”



Foto diatas diberi keterangan “Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menerima wartawan dalam konferensi pers digedung DPRD, Kamis (5/3/2015) siang setelah terjadinya deadlock mediasi”. Foto tersebut digunakan Kompas.com untuk menekankan arah pemberitaannya tentang tim angket DPD DKI Jakarta.

Setelah dianalisis, pada berita ini Kompas.com memperlihatkan pandangan mereka terhadap proses penyelidikan hak angket. Kompas.com melihat proses tersebut tidak berjalan baik dengan kurangnya koordinasi dari tim angket. Kompas.com merekonstruksi hal tersebut dalam berita dengan memperlihatkan pernyataan-pernyataan yang berbeda dari tim angket DPRD DKI seperti jadwal rapat hingga upaya pelaporan Ahok. Skema tersebut disusun untuk memperlihatkan ketidakkompakan tim angket DPRD DKI dalam proses penyelidikan hak angket. Sehingga *frame* pada berita ini adalah “tim angket DPRD DKI tidak kompak dalam proses-proses penyelidikan hak angket”.

**Frame: Tim angket DPRD DKI tidak kompak dalam proses-prose penyelidikan hak angket.**

Tabel 3.11

Sajian Analisis Berita “DPRD DKI yang Kurang Koordinasi”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	1) <i>Headline</i> : DPRD DKI yang Kurang Koordinasi 2) <i>Lead</i> : Selama ini, banyak ketidakkompakan yang terjadi dalam internal DPRD DKI. Baik dalam hal-hal kecil seperti jadwal rapat hingga upaya pelaporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 3) <i>Latar Informasi</i> : Beberapa hal lain yang menunjukkan inkonsistensi anggota Dewan ialah mengenai jadwal pemanggilan ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Pemanggilan terhadap Prasetio sudah dijadwalkan beberapa kali. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pemanggilan Prasetio. Padahal, pemanggilan Prasetio bersinggungan langsung dengan tujuan awal pembentukan tim angket, yaitu untuk menyelidiki keaslian dokumen APBD yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Mendagri.

	<p>4) Sumber:</p> <p>a) Anggota dewan dari fraksi PKS yang juga panitia angket Tubagus Arif</p> <p>b) Ketua Tim Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji</p> <p>c) Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lulung Lunggana</p> <p>5) Pernyataan:</p> <p>“Sekitar jam 10.00 kita rapat angket agendanya memanggil BUMD,”</p> <p>Belum ada agenda rapat karena panitia mau rapat evaluasi kerja panitia angket selama sepekan bersama panitia angket,”</p> <p>“Soal penyuaan Rp 12,7 triliun, sama aja dengan dengan (anggaran) siluman (yang diributkan Ahok),”</p> <p>“Yang bilang tarik dan tidak kan saya bukan Pak Haji Lulung. Yang ketua hak angket kan saya,”</p> <p>6) Penutup: Ongen mengatakan, dugaan suap yang dilakukan Basuki atau Ahok harus tetap dilaporkan. Meskipun baru sekadar upaya penyuaan saja. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada kelanjutan lagi tentang dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun itu. Saat ditanya, Ongen mengatakan, tim angket masih mencoba menyelesaikan semua hal satu per satu.</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : Ketidakkompakan tim angket DPRD DKI dalam proses penyelidikan hak angket</p> <p>8) <i>Who</i> : Tim Angket DPRD DKI Jakarta</p> <p>9) <i>Why</i> : Berbedanya pernyataan dari tim angket terkait rapat hak angket yang menjadwalkan memanggil pejabat BUMD, jadwal pemanggilan ketua DPRD DKI, hingga upaya pelaporan Ahok ke KPK</p> <p>10) <i>Where</i> : -</p> <p>11) <i>When</i> : Senin (16/3/2015) dan Senin (9/3/2015)</p> <p>12) <i>How</i> : Pernyataan-pernyataan yang berbeda dari narasumber dan narasi berita yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan tindakan DPRD terkait beberapa proses penyelidikan hak angket.</p>
Tematik	13) Ketidakkompakan tim angket DPRD DKI Jakarta pada proses penyelidikan hak angket
Retoris	<p>14) Penggunaan kata: “Inkonsistensi”</p> <p>15) Grafis: foto</p>

## 5. Analisis Berita “Tak Panggil Ahok dalam Rapat Angket, DPRD Dinilai Tidak Etis”

Berita yang akan dianalisis ini masuk kedalam jenis berita *indepth news* dikarenakan berisi pendapat dari pengamat terkait perkembangan berjalannya proses penyelidikan hak angket dimana tim angket tidak akan memanggil Ahok dalam prosesnya. Nilai berita yang terkandung adalah kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Kompas.com terhadap proses berjalannya penyelidikan hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis struktur **sintaksis**, Kompas.com menggunakan *headline* “Tak Panggil Ahok dalam Rapat Angket, DPRD Dinilai Tidak Etis”. Dari judul tersebut dapat dilihat Kompas.com memberikan citra yang negatif terhadap DPRD. Kompas.com melalui judulnya memperlihatkan bahwa DPRD dinilai tidak etis karena tidak memanggil Ahok dalam rapat angket. Pandangan tersebut juga dapat dilihat pada *lead* yang digunakan berikut:

Tidak dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dalam proses angket yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dianggap sebagai kejanggalan oleh sebagian pihak. Karena itu, tidak menutup kemungkinan Ahok naik pitam saat menanggapi proses hak angket yang terlihat berat sebelah.

Pada *lead* diatas, Kompas.com melihat tidak dipanggilnya Ahok dianggap sebagai kejanggalan oleh sebagian pihak. Kompas.com melihat bahwa proses hak angket adalah berat sebelah dan memungkinkan Ahok akan marah. Lead tersebut

mengkomunikasikan bahwa ketidaketisan tim angket DPRD DKI dapat dilihat dari adanya pihak yang menganggap hal tersebut sebagai kegagalan dan terlihat berat sebelah pada proses penyelidikan.

**Latar informasi** yang digunakan dalam berita ini membawa sudut pandang kepada pembaca bahwa pemanggilan Ahok perlu dilakukan agar informasi yang didapatkan berimbang. Kompas.com menekankan hal tersebut berguna untuk penyelidikan. Berikut latar informasinya:

Pemanggilan ini berguna untuk mendapatkan informasi yang berimbang dalam proses penyelidikan terhadap kebijakan Ahok mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2015.

Selanjutnya **kutipan sumber** berita ini adalah pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ikhsan Darmawan. Kompas.com melalui narasumber menekankan hal tersebut adalah benar dengan pernyataan dari narasumber yang mempunyai kapasitas sebagai pengamat politik apalagi dari universitas terbaik di Indonesia. **Pernyataan** dari Ikhsan Darmawan yang dimuat dalam teks berita Kompas.com adalah sebagai berikut:

“Saya pikir argumen berat sebelah itu wajar karena (Ahok) seharusnya dipanggil, sejauh hak angket tujuannya untuk menyelidiki,”

“Menyelidiki itu kan penting, apalagi kalau dapat informasi yang banyak karena nanti akan berimbang. Perlu dicatat, itu enggak salah”

“Sumber penyelidikan Itu kan bisa dari yang tertulis, ahli, atau bisa si yang disangkakan, seperti Ahok. Nah, Ahok itu berhak membela diri, termasuk mengonfirmasi informasi yang didapat DPRD terkait dirinya,”

“Nah, ini yang tidak dilakukan DPRD. Ya kalau bisa dinilai, enggak etis juga ya. Ini terlalu dipaksakan sehingga tujuan dari hak angket terhadap Ahok ini jelas, diberhentikan,”

Pernyataan narasumber diatas memberikan pandangan bahwa hak angket adalah tidak berimbang karena Ahok tidak dipanggil oleh tim angket. Pemanggilan Ahok oleh tim angket perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berimbang terkait temuan tim angket. Pemanggilan Ahok juga berguna untuk membela diri terhadap dugaan temuan hak angket agar keputusan hak angket tidak berat sebelah dan merugikan Ahok. Kompas.com melalui pernyataan seperti itu menekankan bahwa pemanggilan Ahok adalah wajib dilakukan.

**Penutup** dari berita ini adalah pernyataan keempat dari narasumber. Dengan begitu Kompas.com memberikan pandangan kepada pembaca bahwa apabila Ahok tidak dipanggil oleh tim angket untuk memberikan informasi maka bisa dikatakan tujuan dari hak angket adalah untuk memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan analisis pada struktur **skrip**, berita ini mengisahkan DPRD DKI yang dinilai tidak etis dalam proses penyelidikan hak angket (*what*). Penilaian tersebut dikemukakan oleh pengamat politik, Ikhsan Darmawan (*who*) di Universitas Indonesia, Depok (*where*), pada hari Selasa 24 Maret 2015 (*when*). Dalam berita dijelaskan DPRD DKI tidak etis karena tidak memanggil Ahok dalam rapat angket padahal pemanggilan itu berguna untuk mendapatkan informasi yang berimbang terkait temuan tim angket selama proses penyelidikan (*why*). Unsur *how* dalam berita dapat dilihat pada pernyataan-pernyataan narasumber yang menjelaskan bagaimana ketidak-etisan tim angket dalam prosesnya.



Selanjutnya, berdasarkan analisis struktur **tematik**, tema yang diangkat berita ini untuk disampaikan adalah tim angket perlu memanggil Ahok dalam proses penyelidikan untuk mendapatkan hasil yang berimbang. Perlunya pemanggilan tersebut dijelaskan dengan memberikan **detail** berita mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Bila dilihat, paragraf yang disusun kebanyakan mengacu pada penekanan perlunya pemanggilan Ahok dengan pencantuman kutipan sumber berita sebagai penekanannya. Tema ini juga didukung dengan penggunaan perangkat *framing* koherensi pada pernyataan narasumber. Koherensi yang digunakan adalah **koherensi sebab akibat** dengan kata hubung “**karena**”. Pernyataan narasumber yang menggunakan koherensi sebab akibat antara lain:

“Saya pikir argumen berat sebelah itu wajar **karena** (Ahok) seharusnya dipanggil, sejauh hak angket tujuannya untuk menyelidiki,”

“Menyelidiki itu kan penting, apalagi kalau dapat informasi yang banyak **karena** nanti akan berimbang. Perlu dicatat, itu enggak salah,”

Penggunaan koherensi sebab akibat pada pernyataan narasumber memperlihatkan sisi ketidak-etisan tim angket DPRD karena tidak memanggil Ahok. Koherensi tersebut juga menekankan aspek pentingnya pemanggilan Ahok karena tujuannya adalah untuk menyelidiki dan hasil yang didapatkan nanti dapat berimbang. Dengan begitu tema ini mendukung *frame* Kompas.com yang melihat proses hak angket berat sebelah dengan tidak dipanggilnya Ahok.

Struktur terakhir yang di analisis pada berita adalah struktur **retoris**. Berdasarkan hasil analisis terdapat penggunaan kata “kejanggalan”. Arti kata “janggal” adalah tidak biasanya; tidak menurut kebiasaan (<http://kbbi.web.id/janggal>, diakses tanggal 5 November 2015 pukul 13.21 WIB).

Penggunaan ini digunakan Kompas.com untuk memperlihatkan dan menekankan bahwa proses penyelidikan hak angket yang berjalan tidak seperti biasanya atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan penyelidikan sebagaimana mestinya.

Terdapat juga penggunaan kata “berat sebelah”. Dengan tidak dipanggilnya Ahok, Kompas.com melihat hal itu sebagai sesuatu yang berat sebelah. Menurut KBBI, arti kata berat sebelah adalah memihak salah satu; tidak adil (<http://kamuskbbi.web.id/arti-kata-berat-sebelah-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia-kbbi.html>, diakses tanggal 5 November 2015 pukul 14.52 WIB). Kompas.com menekankan fakta melalui kata ini untuk memperlihatkan bahwa tidak dipanggilnya Ahok adalah sesuatu yang tidak adil dengan begitu kata ini kembali menekankan perlu dipanggilnya Ahok dalam proses penyelidikan. Kompas.com juga menggunakan perangkat *framing* grafis berupa foto dalam beritanya. Berikut foto yang dimuat dalam beritanya:

Gambar 3.11

Foto pada berita “Tak Panggil Ahok dalam Rapat Angket, DPRD Dinilai Tidak Etis”



Foto diatas diberi keterangan “Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan surat penolakan DPRD menerbitkan Perda APBD 2015, di Balai Kota, Senin (23/3/2015)”. Foto tersebut digunakan Kompas.com untuk menekankan fakta pemberitaan yang didalamnya melibatkan Ahok.

Setelah dianalisis, pada berita ini Kompas.com memberikan pandangan mereka terhadap proses penyelidikan hak angket dimana dalam prosesnya tersebut, tim angket DPRD tidak akan memanggil Ahok untuk dimintai keterangan. Kompas.com merekonstruksi tidak dipanggilnya Ahok adalah sesuatu yang tidak etis sehingga memungkinkan proses penyelidikan hak angket terlihat berat sebelah. Seharusnya tim angket perlu memanggil Ahok untuk dimintai keterangan karena hak angket ini berkaitan langsung dengan Ahok. Konstruksi tersebut ditekankan Kompas.com dengan pernyataan dari pengamat politik untuk memperlihatkan bahwa hal tersebut adalah salah. Sehingga *Frame* yang dibuat Kompas.com pada berita ini adalah “Proses penyelidikan hak angket berat sebelah”.

***Frame: Proses penyelidikan hak angket berat sebelah dengan tidak dipanggilnya Ahok oleh tim angket***

Tabel 3.12

Sajian Analisis berita “Tak Panggil Ahok dalam Rapat Angket, DPRD Dinilai Tidak Etis”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	1) <i>Headline</i> : Tak Panggil Ahok dalam Rapat Angket, DPRD Dinilai Tidak Etis 2) <i>Lead</i> : Tidak dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Basuki

	<p>“Ahok” Tjahaja Purnama dalam proses angket yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dianggap sebagai kejanggalan oleh sebagian pihak. Karena itu, tidak menutup kemungkinan Ahok naik pitam saat menanggapi proses hak angket yang terlihat berat sebelah.</p> <p>3) Latar Informasi: Pemanggilan ini berguna untuk mendapatkan informasi yang berimbang dalam proses penyelidikan terhadap kebijakan Ahok mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2015.</p> <p>4) Sumber: Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ikhsan Darmawan</p> <p>5) Pernyataan:  “Saya pikir argumen berat sebelah itu wajar karena (Ahok) seharusnya dipanggil, sejauh hak angket tujuannya untuk menyelidiki,”</p> <p>“Menyelidiki itu kan penting, apalagi kalau dapat informasi yang banyak karena nanti akan berimbang. Perlu dicatat, itu enggak salah,”</p> <p>“Sumber penyelidikan Itu kan bisa dari yang tertulis, ahli, atau bisa si yang disangkakan, seperti Ahok. Nah, Ahok itu berhak membela diri, termasuk mengonfirmasi informasi yang didapat DPRD terkait dirinya,”</p> <p>“Nah, ini yang tidak dilakukan DPRD. Ya kalau bisa dinilai, enggak etis juga ya. Ini terlalu dipaksakan sehingga tujuan dari hak angket terhadap Ahok ini jelas, dihentikan,”</p> <p>6) Penutup: “Nah, ini yang tidak dilakukan DPRD. Ya kalau bisa dinilai, enggak etis juga ya. Ini terlalu dipaksakan sehingga tujuan dari hak angket terhadap Ahok ini jelas, dihentikan,” kata Ikhsan.</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : DPRD DKI yang dinilai tidak etis dalam proses penyelidikan hak angket</p> <p>8) <i>Who</i> : Pengamat politik, Ikhsan Darmawan</p> <p>9) <i>Why</i> : Karena tidak memanggil Ahok dalam rapat angket padahal pemanggilan itu berguna untuk mendapatkan informasi yang berimbang terkait temuan tim angket selama proses penyelidikan</p> <p>10) <i>Where</i> : Universitas Indonesia, Depok</p>

	11) <i>When</i> : Selasa 24 Maret 2015 12) <i>How</i> : pernyataan-pernyataan narasumber yang menjelaskan bagaimana ketidak-etisan tim angket dalam prosesnya.
Tematik	13) Tim angket perlu memanggil Ahok dalam proses penyelidikan untuk mendapatkan hasil yang berimbang
Retoris	14) Penggunaan kata: “kejanggalan” dan “berat sebelah” 15) Grafis: Foto

## 6. Analisis Berita “Hak Angket soal Etika Justru Akan “Menampar” DPRD DKI Jakarta”

Berita ini memberitakan pendapat dari pengamat terhadap hak angket yang mempersoalkan etika Ahok. Karena berita ini masih terkait pada permasalahan hak angket yang diberikan pendapat dari pengamat sehingga bisa dikatakan jenis berita ini adalah *indepht news*. Bila dilihat dari nilai berita, berita ini bernilai berita kekinian (*timeliness*) dikarenakan sudah menjadi sifat berita *online* yang menyajikan berita terbaru untuk disajikan kepada pembaca terkait perkembangan hak angket terhadap Ahok yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan begitu berita ini akan memperlihatkan pandangan Kompas.com terhadap hak angket. Untuk mengetahui *frame* berita ini dapat dilihat pada analisis berikut:

Berdasarkan analisis struktur **sintaksis**, Kompas.com menggunakan **headline** “Hak Angket soal Etika Justru Akan “Menampar” DPRD DKI Jakarta”. Dari judul tersebut Kompas.com menilai hak angket yang mempersoalkan etika Ahok justru akan menampar DPRD sendiri. Secara tidak langsung Kompas.com memperlihatkan Ahok tidak bersalah soal etika dan DPRD lah yang seharusnya bersalah kalau mempersoalkan etika karena akan berdampak terhadap DPRD sendiri.

*Lead* yang digunakan Kompas.com pada berita ini adalah sebagai berikut:

Kisruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di DKI Jakarta seharusnya telah usai setelah DPRD DKI menyetujui penerbitan peraturan gubernur dan menggunakan pagu APBD Perubahan tahun lalu untuk APBD 2015, Senin (23/3/2015). Namun, DPRD tetap akan menggunakan hak angket atau hak menyelidiki terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah melanggar etika karena berkata kasar dan melakukan fitnah terhadap anggota DPRD.

Dari *lead* tersebut Kompas.com memberikan sudut pandang dari beritanya. Kompas.com melihat dengan disetujuinya penerbitan peraturan Gubernur dan menggunakan APBD tahun lalu untuk APBD 2015, maka hak angket seharusnya sudah selesai dilakukan. Namun DPRD akan tetap melanjutkan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika oleh Ahok yang dianggap sering berkata kasar.

**Latar informasi** yang digunakan adalah pandangan dari pengamat politik yang menilai hak angket soal etika akan berbalik ke arah DPRD sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada latar informasi berikut:

Pengamat politik, Said Salahudin, mengingatkan agar DPRD DKI berhati-hati dalam mengubah arah hak angket tersebut. Perubahan hak angket ke ranah etika justru bisa menjadi bumerang bagi anggota DPRD sendiri.

Latar informasi tersebut menekankan pandangan Kompas.com kepada khalayak bahwa hal tersebut akan berimbas pada DPRD. Menurut Kompas.com DPRD lah yang lebih melanggar Etika dibandingkan Ahok karena sempat terdengar makian dari anggota DPRD untuk Ahok pada saat mediasi antara DPRD dengan Ahok di Kemendagri. Untuk lebih meyakinkan *framingnya* dan hal tersebut benar, Kompas.com menggunakan **kutipan sumber** dari pengamat

politik Said Salahudin. Berikut **pernyataan** narasumber yang dicantumkan pada teks beritanya:

“Kalau masuk etika, ini akan menjadi perdebatan publik, justru akan 'menampar' muka anggota DPRD. Karena bicara soal etika dan tata krama, dalam beberapa hari terakhir muncul kalimat tidak senonoh di Kemendagri oleh anggota DPRD,”

“Mekanismenya harus dari awal lagi, tidak bisa diubah begitu saja,”

Dari pernyataan diatas menekankan pandangan Kompas.com bahwa soal etika akan menjadi perdebatan semua orang karena DPRD sendiri pernah mengucapkan kalimat tidak senonoh di kemendagri. Dengan begitu DPRD lah yang dianggap melanggar etika.

Kompas.com bisa dikatakan tidak setuju terhadap hak angket yang mempersoalkan etika Ahok. Menurut Kompas.com bahwa etika DPRD lah yang harus diperbaiki. Hal tersebut tercermin dalam **penutup** berita ini:

Beberapa waktu lalu, pernyataan bernada kasar pernah terungkap saat DPRD DKI Jakarta melakukan mediasi dengan Basuki di Kemendagri beberapa waktu lalu. Saat mediasi berakhir deadlock, sejumlah kata seperti "Cina", "bodoh", dan kata kata kasar lainnya terdengar dari ruang mediasi yang diisi mayoritas oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

Penutup tersebut menggambarkan keadaan saat DPRD melontarkan kata kasar terhadap Ahok. Kompas.com ingin mempertegas hal tersebut dan memperlihatkan bahwa DPRD tidak perlu membawa soal etika ke arah hak angket karena DPRD sendiri sering melakukan hal itu sehingga soal etika justru akan berbalik kearah DPRD.

Berdasarkan analisis pada struktur **skrip**, berita ini mengisahkan hak angket yang mempersoalkan etika Ahok justru akan berbalik kepada DPRD DKI (*what*). Dikisahkan akan berbalik kepada DPRD DKI karena dalam beberapa hari terakhir muncul kalimat tidak senonoh yang dilontarkan oleh anggota DPRD sendiri (*why*) di Kemendagri (*where*). Pada berita ini yang dikisahkan adalah DPRD DKI Jakarta (*who*). Tidak dijelaskan kapan (*when*) DPRD DKI melontarkan kata tidak senonoh tersebut. Pada paragraf terakhir, Kompas.com menginformasikan bahwa saat mediasi antara DPRD DKI dan Ahok di Kemendagri berakhir *deadlock*, sejumlah kata seperti “Cina”, “Bodoh”, dan kata kata kasar lainnya terdengar dari ruang mediasi yang diisi mayoritas oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana proses berlangsungnya mediasi yang memperlihatkan kata-kata kasar dari anggota DPRD yang digunakan sebagai unsur *how* dalam berita.

Berdasarkan analisis struktur **tematik**, tema yang disampaikan dalam berita ini adalah hak angket soal etika lebih cocok ditujukan kepada DPRD DKI daripada ke Ahok. Tema ini disusun dengan mencantumkan kutipan sumber sebagai perangkat *framing detail* pada teks berita yang semuanya merujuk pada pernyataan-pernyataan mengapa hak angket soal etika akan berbalik kepada DPRD DKI. Terdapat juga koherensi pada pernyataan narasumber. Pernyataan tersebut adalah:

“Kalau masuk etika, ini akan menjadi perdebatan publik, justru akan ‘menampar’ muka anggota DPRD. **Karena** bicara soal etika dan tata krama, dalam beberapa hari terakhir muncul kalimat tidak senonoh di Kemendagri oleh anggota DPRD,”



Pernyataan diatas menggunakan **koherensi sebab akibat** dengan kata hubung “**karena**”. Koherensi ini digunakan untuk memperlihatkan penyebab hak angket yang mempermasalahkan etika akan berbalik kepada DPRD DKI.

Struktur terakhir yang dianalisis adalah struktur **retoris**. Berdasarkan analisis struktur retoris, untuk menekankan fakta, terdapat penggunaan kata “bumerang”. Kata bumerang menurut KBBI mempunyai arti perkataan (perbuatan, ulah, peraturan, dan sebagainya) yang dapat merugikan atau mencelakakan diri sendiri (<http://kbbi.web.id/bumerang>, diakses tanggal 5 Noveber 2015 pukul 18.46 WI). Dengan begitu, penggunaan kata ini memperlihatkan dan menekankan bahwa hak angket soal etika justru akan berbalik ke DPRD sendiri.

Penekanan fakta juga dilakukan Kompas.com pada judul berita. Dalam judul terdapat perangkat *framing* grafis pada kata “menampar” yang diberi tanda kutip. Pemakaian tanda kutip digunakan Kompas.com untuk menekankan maksud pemberitaan mereka yang melihat soal etika akan berbalik kepada DPRD. Penggunaan grafis tanda kutip juga terdapat di paragraf terakhir berita pada kalimat “Cina” dan “bodoh”. Paragraf terakhir tersebut memberikan gambaran mediasi antara DPRD DKI dan Ahok oleh Kemendagri dimana sempat terdengar ucapan kasar dalam ruangan yang mayoritas diisi oleh anggota DPRD DKI. Kata “Cina” dan “Bodoh” diberikan tanda kutip oleh Kompas.com sebagai penekanan untuk memperlihatkan bahwa anggota DPRD DKI lah yang kenyataannya melanggar etika dengan ucapan kasar dan rasis sehingga hak angket soal etika

justru akan berbalik kearah DPRD DKI sendiri. Grafis dalam bentuk foto juga digunakan dalam berita ini. Berikut foto yang dimuat:

Gambar 3.12

Foto pada berita “Hak Angket soal Etika Justru Akan “Menampar” DPRD DKI Jakarta”



Foto diatas diberi keterangan “Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015, Senin (12/1)”. Penggunaan foto tersebut digunakan untuk menekankan fakta pada isi berita yang mengisahkan anggota DPRD DKI.

Setelah dianalisis, pada berita ini Kompas.com memberikan pandangan mereka terhadap hak angket yang salah satunya mempersoalkan etika Ahok. Dalam beritanya Kompas.com merekonstruksi hak angket soal etika salah sasaran karena DPRD DKI lah yang sering berkata kasar. Konstruksi tersebut didukung oleh pengamat politik dan isi berita yang memperlihatkan adanya pernyataan kasar yang dilontarkan DPRD DKI kepada Ahok pada saat mediasi di

Kemendagri. Dengan begitu pada berita ini Kompas.com membuat *frame* bahwa hak angket soal etika lebih tepat ditujukan kepada DPRD DKI, bukan kepada Ahok.

**Frame: Hak angket soal etika lebih tepat ditujukan kepada DPRD DKI, bukan kepada Ahok.**

Tabel 3.13

Sajian Analisis Berita “Hak Angket soal Etika Justru Akan “Menampar” DPRD DKI Jakarta”

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Headline</i>: Hak Angket soal Etika Justru Akan “Menampar” DPRD DKI Jakarta</li> <li>2) <i>Lead</i>: Kisruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di DKI Jakarta seharusnya telah usai setelah DPRD DKI menyetujui penerbitan peraturan gubernur dan menggunakan pagu APBD Perubahan tahun lalu untuk APBD 2015, Senin (23/3/2015). Namun, DPRD tetap akan menggunakan hak angket atau hak menyelidiki terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah melanggar etika karena berkata kasar dan melakukan fitnah terhadap anggota DPRD.</li> <li>3) <i>Latar Informasi</i>: Pengamat politik, Said Slahaudin, mengingatkan agar DPRD DKI berhati-hati dalam mengubah arah hak angket tersebut. Perubahan hak angket ke ranah etika justru bisa menjadi bumerang bagi anggota DPRD sendiri.</li> <li>4) <i>Sumber</i>: Pengamat politik Said Salahuddin</li> <li>5) <i>Pernyataan</i>:  “Kalau masuk etika, ini akan menjadi perdebatan publik, justru akan ‘menampar’ muka anggota DPRD. Karena bicara soal etika dan tata krama, dalam beberapa hari terakhir muncul kalimat tidak senonoh di Kemendagri oleh anggota DPRD,”   “Mekanismenya harus dari awal lagi, tidak bisa diubah begitu</li> </ol>

	<p>saja,”</p> <p>6) Penutup: Beberapa waktu lalu, pernyataan bernada kasar pernah terungkap saat DPRD DKI Jakarta melakukan mediasi dengan Basuki di Kemendagri beberapa waktu lalu. Saat mediasi berakhir deadlock, sejumlah kata seperti “Cina”, “bodoh”, dan kata kata kasar lainnya terdengar dari ruang mediasi yang diisi mayoritas oleh anggota DPRD DKI Jakarta.</p>
Skrip	<p>7) <i>What</i> : DPRD DKI yang dinilai tidak etis dalam proses penyelidikan hak angket</p> <p>8) <i>Who</i> : Pengamat politik, Ikhsan Darmawan</p> <p>9) <i>Why</i> : Karena tidak memanggil Ahok dalam rapat angket padahal pemanggilan itu berguna untuk mendapatkan informasi yang berimbang terkait temuan tim angket selama proses penyelidikan</p> <p>10) <i>Where</i> : Universitas Indonesia, Depok</p> <p>11) <i>When</i> : Selasa 24 Maret 2015</p> <p>12) <i>How</i> : pernyataan-pernyataan narasumber yang menjelaskan bagaimana ketidak-etisan tim angket dalam prosesnya.</p>
Tematik	<p>13) Tim angket perlu memanggil Ahok dalam proses penyelidikan untuk mendapatkan hasil yang berimbang</p>
Retoris	<p>14) Penggunaan kata: “bumerang”</p> <p>15) Grafis: Foto dan penggunaan tanda kutip pada kata “menampar”, “Cina”, dan “Bodoh”</p>

#### D. Pembahasan

##### 1. Konstruksi Realitas Politik bila dilihat dari perbedaan *framing* Detik.com dan Kompas.com pada peristiwa hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok.

Telah dilakukan analisis pada 12 berita, 6 dari Detik.com dan 6 dari Kompas.com menggunakan analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Semua berita yang dianalisis adalah seputar peristiwa hak angket. *Framing* pada dasarnya adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang akan

dijadikan berita, sehingga cara melihat tersebut berpengaruh pada hasil akhir dan konstruksi realitas (Eriyanto, 2002: 10), dalam hal ini konstruksi realitas politik.

Dalam hal konstruksi realitas politik, saat ini media tidak bisa dipandang pasif, melainkan aktif dalam memainkan peran untuk menyampaikan peristiwa politik yang sedang terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA., selaku dosen Komunikasi Politik Pascasarjana FISIP UI dalam buku Ibnu Hamad (2004: xv) bahwa aktifitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik sering memberi dampak yang signifikan bagi perkembangan politik. Disini media bukan saja sebagai sumber informasi politik, melainkan juga kerap menjadi faktor pendorong (*trigger*) terjadinya perubahan politik. Sehingga dengan kebebasan pers saat ini, bisa dikatakan merupakan salah satu indikator adanya keterbukaan politik itu. Menariknya, setiap media bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing. Kebijakan redaksional yang dimilikinya menentukan isi peristiwa politik yang diberitakan.

Sebagai agen politik, media melakukan proses pengemasan pesan (*framing of political messages*) dan proses inilah sesungguhnya menyebabkan suatu peristiwa atau aktor politik memiliki citra tertentu. Dalam proses pengemasan pesan ini, media dapat memilih fakta yang akan (dan yang tidak) dimasukkan ke dalam teks berita politik. Disamping itu, dalam membuat berita politik media juga bisa memilih simbol-simbol atau label-label politik (Hamad, 2004: xvi).

Karena fakta ini diproduksi dan ditampilkan secara simbolik, maka realitas tergantung pada bagaimana ia dilihat dan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi.

Dalam kata-kata yang ekstrem, realitas atau fakta itu tergantung pada bagaimana ia dilihat. Semua fakta tersebut bisa menjadi benar – didukung oleh fakta dan argumentasi yang sama-sama kuat – tergantung pada bagaimana ia dilihat dan didekati (Eriyanto, 2002: 24).

Berkaitan dengan itu semua, peristiwa politik hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok saat ini menjadi topik hangat yang diperbincangkan di masyarakat. Hal ini terbukti dengan riset yang dilakukan Cyrus Network dimana menunjukkan sebanyak 54,8 persen warga mengaku mengikuti perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dan Ahok. Atas dasar itulah media pun ramai memberitakan peristiwa hak angket dan tentunya karena nilai berita pada peristiwa ini. Masing-masing media mempunyai sudut pandang tersendiri. Seperti halnya Detik.com dan Kompas.com yang juga memberitakan isu hak angket dari sudut pandang yang berbeda.

Dengan menggunakan analisis *framing*, penelitian ini akan mengungkap konstruksi realitas politik yang disajikan oleh Detik.com dan Kompas.com dalam bentuk berita yang mereka sajikan. Dari semua berita yang telah dianalisis, ternyata Detik.com dan Kompas.com mempunyai *frame* yang berbeda terhadap hak angket maupun terhadap berjalannya proses penyelidikan hak angket. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua media ini merekonstruksi pemberitaan hak angket dengan sudut pandang yang berbeda.

Pertama-tama yang akan dibahas adalah perbedaan konstruksi berita Detik.com dan Kompas.com dalam memberitakan pandangan mereka terhadap

hak angket. Setelah dianalisis, *frame* yang dibuat kedua media *online* tersebut sangat berbeda satu sama lain. Berikut adalah perbandingannya:

Tabel 3.14

Perbandingan *Frame* Detik.com dan Kompas.com terhadap hak angket

No	<i>Frame</i> Detik.com	<i>Frame</i> Kompas.com
1	<b>Hak Angket Menimbulkan Pro-Kontra di Internal Partai</b>	<b>Hak angket terhadap Ahok kurang diperhitungkan anggota DPRD dengan internal partai</b>
2	<b>Hak Angket Bukan Untuk Jatuhkan Ahok dan Tidak Perlu Merugikan Rakyat</b>	<b>Hak angket hanyalah akrobat politik anggota DPRD dan merugikan rakyat</b>
3	<b>Hak angket soal etika adalah hal yang wajar karena sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kepanitiaan angket</b>	<b>Hak angket soal etika lebih tepat ditujukan kepada DPRD DKI, bukan kepada Ahok</b>

Sumber: Peneliti

Jika kita melihat pada tabel diatas, maka akan terlihat sangat jelas perbedaan *frame* yang dibuat. Berkaitan pada *frame* yang pertama. Detik.com merekonstruksi adanya perintah penarikan diri dari parpol adalah bentuk kontroversi di internal partai, bukan sebagai bentuk kurangnya perhitungan yang dilakukan DPRD terhadap hak angket sebagaimana yang diberitakan Kompas.com. Sehingga jelas disini Detik.com tidak menjatuhkan DPRD DKI secara langsung dalam beritanya, melainkan parpol. Hal ini bisa dilihat pada judul Detik.com yang tidak menyebut anggota DPRD, melainkan parpol yang ragu lanjutkan hak angket. Sedangkan Kompas.com secara langsung menjatuhkan DPRD DKI dengan judul yang menyebut DPRD DKI kurang perhitungan lakukan hak angket.

Selain itu berkaitan dengan *frame* kedua, Detik.com merekonstruksi hak angket bukanlah upaya anggota DPRD untuk jatuhkan Ahok. Konstruksi tersebut memberikan citra positif dan melakukan pembenaran kepada DPRD DKI. Untuk menekankan hal itu adalah benar adanya, Detik.com menggunakan ketua DPD sebagai narasumbernya yang mempunyai kedudukan tinggi dalam parlemen sehingga pembaca bisa menerima realitas tersebut dan juga mencantumkan jabatan ketua DPD dalam judulnya. Selain itu juga, isi teksnya dijelaskan bahwa hak angket tidak perlu merugikan rakyat. Berbeda dengan Kompas.com yang merekonstruksi hak angket hanya sebagai akrobat politik para anggota DPRD DKI. Konstruksi tersebut secara langsung memberi citra yang negatif kepada DPRD. Pemberian citra negatif kepada DPRD dilakukan Kompas.com pada judul yang secara langsung menyebut akrobat politik dan juga menyebut anggota DPRD dengan kata badut-badut. Selain itu pada teks dijelaskan bahwa hak angket ini hanya merugikan rakyat namun menguntungkan Ahok.

Pada *frame* ketiga, Detik.com dan Kompas.com juga merekonstruksi berbeda terhadap hak angket yang mempersoalkan etika Ahok. Detik.com merekonstruksi hak angket yang mempersoalkan etika adalah wajar karena sudah sesuai dengan tujuan hak angket. Isi teks beritanya pun kebanyakan berisi alasan mengapa DPRD DKI mempersoalkan etika Ahok dalam hak angket. Namun, berbeda dengan Kompas.com yang merekonstruksi hak angket soal etika diluar dari tujuan hak angket dan salah sasaran karena DPRD DKI lah yang bermasalah dengan etika sehingga justru akan berbalik kepada DPRD DKI.



Dari *frame* Detik.com, secara umum mereka merekonstruksi hak angket adalah keputusan benar yang diambil oleh DPRD DKI dan sekaligus memberikan citra yang positif terhadap DPRD DKI. Dengan kata lain Detik.com setuju terhadap hak angket dan memihak kepada DPRD DKI. Berbeda dengan Kompas.com yang membuat *frame* berita yang secara umum merekonstruksi hak angket adalah keputusan yang salah dengan memberikan pemberitaan hak angket dari segi negatif. Dengan kata lain berita yang disajikan Kompas.com menjatuhkan DPRD DKI sekaligus memihak kepada Ahok dalam peristiwa ini.

Perbedaan konstruksi berita Detik.com dan Kompas.com pada peristiwa hak angket juga dapat dilihat pada pemberitaan proses berjalannya penyelidikan hak angket. Kedua media mengambil sudut pandang yang berbeda dalam memberitakannya dan membentuk *frame* yang berbeda pula. Berikut perbandingan *frame* Detik.com dan Kompas.com dalam memberitakan proses penyelidikan hak angket:

Tabel 3.15

Perbandingan *frame* Detik.com dan Kompas.com pada proses berjalannya penyelidikan hak angket

No	<i>Frame</i> Detik.com	<i>Frame</i> Kompas.com
1	<b>Pemanggilan istri Ahok sudah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya hak angket terhadap Ahok</b>	<b>Pemanggilan istri Ahok tidak mempunyai landasan hukum</b>
2	<b>Penyelidikan hak angket berhenti sementara dikarenakan tim angket sedang fokus bahas evaluasi APBD</b>	<b>Tim angket DPRD DKI tidak kompak dalam proses-proses penyelidikan hak angket.</b>
3	<b>Proses penyelidikan Hak angket tidak perlu melibatkan Ahok</b>	<b>Proses penyelidikan hak angket berat sebelah dengan tidak</b>

		<b>dipanggilnya Ahok oleh tim angket</b>
--	--	--

Sumber: Peneliti

Dari tabel diatas bisa dilihat adanya perbedaan *frame* yang dibuat oleh Detik.com dan Kompas.com dalam proses berjalannya penyelidikan hak angket. Berkaitan dengan proses yang memanggil istri Ahok dalam proses penyelidikan, hal tersebut dikonstruksi Detik.com adalah sesuatu yang wajar karena kehadiran istri Ahok pada rapat revitalisasi kota tua. Berbeda dengan Kompas.com yang merekonstruksi proses itu diluar logika hukum yang berlaku.

Proses penyelidikan hak angket yang tertunda dikonstruksi Detik.com dengan memberikan penekanan alasan tim angket yang sedang fokus membahas evaluasi APBD. Sedangkan Kompas.com merekonstruksi bahwa proses penyelidikan hak angket yang dilakukan DPRD DKI terbilang tidak berjalan dengan baik dengan memberitakan kurangnya kordinasi yang dilakukan tim angket seperti perbedaan waktu rapat dan lain-lain.

Selain itu proses penyelidikan tim angket yang tidak akan memanggil Ahok untuk dimintai keterangan, Detik.com merekonstruksi hal tersebut dari sudut pandang tim angket yang menyatakan tidak akan memanggil Ahok apabila bukti-bukti yang didapat sudah cukup membuktikan kesalahan Ahok. Sedangkan Kompas.com merekonstruksi hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak etis dengan memberikan sudut pandang dari pakar pengamat politik.

Secara umum Detik.com merekonstruksi proses penyelidikan hak angket berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya hak angket,

namun berbeda dengan Kompas.com yang merekonstruksi hal tersebut sebagai hal yang salah dan menelenceng dari tujuan dikeluarkannya hak angket.

Sebagaimana yang telah dibahas di atas mulai dari memberitakan pandangan terhadap keputusan hak angket sampai pada proses berjalannya penyelidikan hak angket, bisa dilihat secara garis besar *frame* dari Detik.com adalah setuju terhadap hak angket Detik.com sedangkan *frame* dari Kompas.com adalah tidak setuju terhadap hak angket.

Perbedaan *frame* dari Detik.com dan Kompas.com secara langsung memperlihatkan konstruksi realitas politik yang dibentuk. Pengkonstruksian realitas politik yang dilakukan akan membentuk makna dan citra tertentu terhadap aktor politik – dalam hal ini anggota DPRD DKI dan Ahok – sehingga media tentunya melakukan penekanan-penekanan dengan strategi wacana tertentu dalam beritanya untuk memberikan makna dan citra terhadap aktor politik. Strategi wacana yang dilakukan Detik.com dapat dilihat dari penggunaan narasumber yang kebanyakan dari tim angket sendiri. Kutipan sumber yang dicantumkan dalam teks beritanya mengarah pada alasan-alasan yang merujuk pada pembenaran-pembenaran (klarifikasi) terhadap hak angket maupun proses berjalannya penyelidikan yang dikonstruksi Detik.com untuk memberikan citra yang baik terhadap anggota DPRD DKI. Sedangkan Kompas.com menggunakan strategi wacana dengan penggunaan narasumber dari para pakar dan pengamat. Kutipan sumber yang dicantumkan dalam teks beritanya mengkritisi keputusan hak angket maupun proses berjalannya penyelidikan hak angket sebagai hal yang salah

sehingga konstruksi yang dibuat memberikan citra yang buruk terhadap DPRD DKI Jakarta.

*Frame* berbeda yang dibuat oleh Detik.com dan Kompas.com dengan pandangan berbeda dan sisi tertentu untuk memberikan pembenaran terhadap salah satu pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Bisa dilihat Detik.com dalam peristiwa hak angket berusaha melakukan pembenaran terhadap DPRD DKI Jakarta dengan *frame* beritanya sedangkan Kompas.com berusaha membenarkan Ahok dengan *frame* pemberitaan yang mengkritisi langkah-langkah anggota DPRD DKI Jakarta sebagai sesuatu yang salah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Eriyanto (2002:175), *framing* berkaitan dengan bagaimana realitas dilihat dan dengan cara apa pula realitas tersebut dilihat. Melihat peristiwa dengan realitas tertentu, secara tidak langsung memberikan pembenaran dan legitimasi pada sisi tertentu dari peristiwa atau aktor tertentu yang terlibat dalam peristiwa.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pemberitaan Pada Detik.com dan Kompas.com**

Perlu diketahui sebelumnya bahwa realitas adalah hasil konstruksi, maka realitas yang tercipta dilakukan dengan menggunakan sudut pandang tertentu atau perspektif tertentu. Berita bukanlah sebuah realitas murni, berita bukanlah sebuah realitas asli, namun merupakan hasil konstruksi media terhadap suatu realitas. Seperti halnya Detik.com dan Kompas.com menyajikan peristiwa hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok yang mempunyai sudut pandang atau perspektif berbeda.

Dalam berita yang disajikan oleh Detik.com dan Kompas.com yang telah dianalisis, sangat jelas terlihat perbedaan-perbedaan dalam membingkai peristiwa hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok. Perbedaan dalam kasus yang sama-sama diangkat oleh kedua media tersebut merupakan sesuatu yang wajar sebagaimana peran media sebagai penyampai informasi walaupun sudut pandang yang diambil berbeda satu sama lain. Namun, perbedaan tersebut tentu tidak muncul begitu saja melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Bila dilihat dari latar belakang berdirinya media, kedua media ini mempunyai dasar yang berbeda. Detik.com sebenarnya boleh dikatakan sebagai bentuk transformasi dari majalah DeTik. Majalah DeTik adalah sebuah majalah politik yang didirikan oleh Eros Djarot bersama dengan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Namun, kekuatan Orde Baru yang sangat ketat mengawasi pemberitaan di media massa, memaksa majalah tersebut menyudahi kiprahnya untuk terbit dalam format majalah. Hal ini karena DeTik dianggap terlalu keras dalam pemberitaannya yang dianggap menyerang penguasa saat itu.

Latar belakang inilah menjadi faktor mengapa Detik.com lebih mendukung DPRD DKI dalam peristiwa hak angket. Bisa dikatakan dibredelnya media mereka pada masa lalu mengakibatkan ketakutan untuk menyerang pemerintah dan pihak yang berkuasa dalam beritanya sehingga Detik.com lebih memilih mendukung hak angket yang dilakukan DPRD DKI. Detik.com cenderung bermain aman dengan tidak mengkritik keputusan DPRD DKI yang mengeluarkan hak angket namun memberikan sudut pandang positif terkait keputusan tersebut.

Sedangkan bila kita melihat latar belakang berdirinya Kompas.com, dimulai pada tahun 1995 dengan nama Kompas *Online*. Kompas *Online* pada awalnya hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian Kompas sehingga Kompas.com tentunya tidak bisa dilepaskan dari harian Kompas sebagai induknya dimana Kompas didirikan sebagai corong partai Katolik pada masa pemerintahan Soekarno. Oleh karena itu, Ideologi Kompas.com sangat berkaitan erat dengan ideologi harian Kompas.

Tampaknya pada tataran ini mempertegas perbedaan pemberitaan Kompas.com yang lebih condong mendukung Ahok. Bila dilihat latar belakang agama Ahok adalah seorang Kristen Protestan. Memang Kompas.com tidak secara langsung memperlihatkan dukungannya terhadap Ahok, namun bila dilihat pada berita yang dianalisis, semuanya memperlihatkan ketidaksetujuan Kompas.com terhadap hak angket dengan merekonstruksi hak angket adalah keputusan yang salah dan memperlihatkan proses penyelidikan hak angket dari sisi negatif. Maka secara tidak langsung Kompas.com memposisikan diri berpihak kepada Ahok. Nama Kompas yang sering diplesetkan dengan “Komando Pastor” bukanlah suatu lelucon belaka, melainkan benar pada peristiwa hak angket ini.

Faktor yang mempengaruhi perbedaan pemberitaan kedua media ini juga bisa dilihat pada kepemilikan media. Pemilik media terkadang menerapkan ideologinya dalam media sehingga berita-berita didalam media tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan aktif dalam memainkan peran kepentingan pemilik media. Detik.com Pada tanggal 3 Agustus 2011, Detik.com (PT. Agranet Multicitra Siberkom) resmi dibeli oleh Chairul Tanjung. Chairul

Tanjung sendiri dikenal dengan sosok pengusaha sehingga bisa dikatakan berita yang disajikan mengedepankan kepentingan bisnis dari pemilik media.

Kompas.com merupakan media online yang dikelola oleh PT. Kompas Cyber Media yang merupakan anak perusahaan dari Kompas Gramedia dimana Jakob Oetama adalah pemilik perusahaan ini. Sosok Jakob Oetama selaku pendirinya dikenal sebagai seorang humanis kristiani. Sehingga bisa dikatakan kedekatan agama dari pemilik media (Jakob Oetama) dengan salah satu pihak yang terlibat dalam hak angket (Ahok) yang beragama Kristen juga menjadi faktor mengapa berita Kompas.com lebih kepada menjatuhkan DPRD DKI.

Faktor terakhir yang menyebabkan perbedaan berita kedua media tersebut adalah faktor ekstra media. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Shoemaker dan Reese bahwa pada faktor ekstra media berhubungan dengan faktor lingkungan diluar media seperti sumber berita dan sumber penghasilan media. Dalam peristiwa ini, ekstra media yang menjadi faktor perbedaan *frame* Detik.com dan Kompas.com terletak pada sumber beritanya. Terlihat dari 6 berita Detik.com yang dianalisis, 5 berita diantaranya menggunakan sumber dari tim angket DPRD DKI dan 1 berita menggunakan sumber dari ketua DPD. Sedangkan Kompas.com menggunakan sumber para pengamat dari 5 beritanya dan hanya 1 berita yang sumbernya oleh tim angket DPRD DKI Jakarta.

Menurut Hall dalam Eriyanto (2002: 160-162), wartawan tergantung pada sumber berita, dan laporan berita yang ditulis mau tidak mau harus mewawancarai pihak-pihak tertentu yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangan jurnalistik

profesional, kelompok elit (pejabat pemerintah, pengusaha, dan orang yang berpengaruh) seringkali disebut sebagai sumber yang kredibel. Kelompok elit yang diidentifikasi sebagai sumber kredibel dan terpercaya tersebut tidak hanya sebatas sumber, tetapi ia bisa menjadi pendefinisi utama dari realitas (*primary definers*). Sumber berita itu bukan hanya mendefinisikan dan menjelaskan mengenai dirinya sendiri, ia bahkan mendefinisikan realitas dan kelompok lain.